



PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015

SUPAS2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

PROFIL PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG
HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS 2015

<http://lampung.go.id>

PROFIL PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG

HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS 2015

ISBN : 978-602-7848-72-6
No. Publikasi : 18520.1607
Katalog BPS : 2101033.18
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xi + 92

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

BPS Provinsi Lampung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Kata Pengantar

Kegiatan penulisan Profil Kependudukan Provinsi Lampung merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Publikasi ini menyajikan ulasan secara deskriptif situasi penduduk Provinsi Lampung dari hasil pengumpulan data SUPAS 2015 dan merupakan pelengkap dari seri penerbitan “Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015” yang berisi tabel-tabel. Aspek kependudukan yang dibahas meliputi fertilitas dan keluarga berencana, mortalitas, mobilitas penduduk, kesulitan fungsional, keadaan perumahan serta pengetahuan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk Lampung atas partisipasinya dalam kegiatan SUPAS2015. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini.

Bandar Lampung, November 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung

Yeane Irmaningrum, MA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II. Gambaran Umum Kependudukan Provinsi Lampung.....	5
2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk.....	5
2.2. Distribusi Penduduk.....	8
2.3. Tantangan Masa Depan: Bonus Demografi.....	9
Bab III. Fertilitas dan Keluarga Berencana	15
3.1. Pola Fertilitas di Provinsi Lampung	15
3.2. Keadaan Program Keluarga Berencana Indonesia	25
Bab IV. Mortalitas dan Kesehatan.....	31
4.1. Kematian Bayi dan Balita	31
4.2. Kematian Ibu	34
Bab V. Mobilitas Penduduk.....	39
5.1. Migrasi Risen.....	39
5.2. Komuter	45
Bab VI. Kesulitan Fungsional.....	47

6.1. Potret Disabilitas	47
6.2. Distribusi Disabilitas	56
Bab VII. Perumahan	65
7.1. Keadaan Perumahan	65
7.2. Pemenuhan Kebutuhan Untuk Perumahan.....	73
Bab VIII. Perubahan Iklim	77
8.1. Pengetahuan Tentang Perubahan Iklim.....	77
8.2. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	80
Referensi.....	87

<http://lampung.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2015	6
Tabel 2.2. Penduduk menurut Klasifikasi Wilayah di Provinsi Lampung, 2015	7
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Lampung, 2015	8
Tabel 2.4. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	9
Tabel 3.1. Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup (Paritas) menurut Umur Wanita Pernah Kawin di Provinsi Lampung, 2010 dan 2015	17
Tabel 3.2. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur dan Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2015	18
Tabel 3.3. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur dan Jumlah Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015.....	21
Tabel 3.4. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama dan Jumlah Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015	21
Tabel 3.5. Rata-rata Paritas dan Persentase Wanita Berstatus Pernah Kawin, Pemakaian Alat KB dan Umur Wanita di Provinsi Lampung, 2015	22
Tabel 3.6. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Kelompok Umur dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015	26
Tabel 3.7. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015.....	27
Tabel 3.8. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Pendidikan dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015	28
Tabel 3.9. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Jumlah Anak Masih Hidup dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015.....	29

Tabel 4.1. Lokasi Kejadian Kematian Ibu di Berbagai Negara	36
Tabel 5.1. Alasan Pindah Migran yang Masuk ke Provinsi Lampung, 2015.....	40
Tabel 5.2. Volume dan Arah Migrasi Risen menurut Daerah Asal/Tujuan di Provinsi Lampung, 2015	41
Tabel 5.3. Persentase Penduduk Migran Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015.....	43
Tabel 5.4. Persentase Penduduk Migran Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015.....	43
Tabel 5.5. Persentase Penduduk Migran Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2015	44
Tabel 5.6. Persentase Penduduk Migran Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015.....	45
Tabel 6.1. Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas menurut Jenis dan Tingkat Kesulitan Disabilitas di Provinsi Lampung, 2015.....	49
Tabel 6.2. Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Bersekolah di Provinsi Lampung, 2015	55
Tabel 6.3. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Penglihatan menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015.....	56
Tabel 6.4 Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Penglihatan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	57
Tabel 6.5. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Pendengaran menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015.....	58
Tabel 6.6. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Pendengaran menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	58
Tabel 6.7. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Berjalan/Naik Tangga menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015.....	60

Tabel 6.8. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Berjalan/Naik Tangga menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	60
Tabel 6.9. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Bicara/Komunikasi menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015	62
Tabel 6.10. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Bicara/Komunikasi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	62
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2015	65
Tabel 7.1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	66
Tabel 7.2 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	67
Tabel 7.3. Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai per Kapita Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	68
Tabel 7.4. Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015.....	69
Tabel 7.5 Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015	69
Tabel 7.6. Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	70
Tabel 7.7. Penggunaan Bahan Bakar/ Energi Utama Memasak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	72
Tabel 8.1. Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015	78
Tabel 8.2. Jumlah Rumah Tangga yang Pernah tahu tentang Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015.....	79

Tabel 8.3. Jumlah Rumah Tangga yang Mengetahui Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015	80
Tabel 8.4 Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara Lebih Panas 5 Tahun Terakhir di Provinsi Lampung,2015	82
Tabel 8.5. Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 Tahun Terakhir Provinsi Lampung, 2015	83
Tabel 8.6. Jumlah Rumah Tangga yang Melakukan Upaya Mengurangi Kelangkaan Air Bersih di Provinsi Lampung, 2015	84

<http://lampung.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2015	5
Gambar 2.2. Angka Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota.....	10
Gambar 2.3. Bonus Demografi di Provinsi Lampung	11
Gambar 3.1. Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas oleh Ronald Freedman	16
Gambar 3.2. Skema Hubungan Kausal dalam Analisa Fertilitas.....	16
Gambar 3.1. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung, 2015	19
Gambar 3.2. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015.....	23
Gambar 3.3. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015	24
Gambar 3.4. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Status Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015.....	25
Gambar 3.5. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Tempat Memperoleh Alat/Cara KB di Provinsi Lampung, 2015	29
Gambar 3.6. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Alasan Tidak Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung, 2015.....	30
Gambar 4.1. Persentase Kejadian Kematian Bayi dan Balita di Provinsi Lampung, 2015	32
Gambar 4.2. Persentase Kejadian Kematian Ibu menurut Masa Kehamilan.....	35
Gambar 4.3. Lokasi Kejadian Kematian Ibu berdasarkan Masa Kehamilan di Provinsi Lampung, 2015.....	36
Gambar 5.1. Tren Migrasi Risen di Provinsi Lampung (Ribu Jiwa), 1980-2015 ...	39

Gambar 5.2. Persebaran Penduduk Migran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015.....	42
Gambar 5.3. Piramida Penduduk Migran di Provinsi Lampung, 2015	42
Gambar 5.4. Kegiatan Utama yang dilakukan Komuter di Provinsi Lampung, 2015	45
Gambar 5.5. Transportasi Utama yang Biasa digunakan Komuter di Provinsi Lampung, 2015.....	46
Gambar 6.1. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015	50
Gambar 6.2. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2015.....	51
Gambar 6.3. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2015	52
Gambar 6.4. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015	53
Gambar 6.5. Persentase Penyandang Disabilitas Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015.....	55
Gambar 6.6. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	56
Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Atap Terluas Bangunan	65
Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Lampung, 2015.....	71
Gambar 7.3. Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015	74

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Secara umum dinamika kependudukan dipengaruhi 3 (tiga) faktor utama yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan penduduk atau migrasi (Adioetomo dan Samosir, 2010). Masing-masing faktor utama ini diukur dengan menyusun berbagai indikator melalui sumber data yang tersedia. Dengan series perkembangan indikator kependudukan dari tahun ke tahun dapat dihasilkan berbagai analisis deskriptif tentang dinamika kependudukan di suatu wilayah tertentu.

Penduduk baik sebagai individu ataupun dalam kelompok masyarakat, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dilihat dari status sosial maupun ekonominya. Perubahan ini (baik dalam skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota) akan merubah karakteristik kependudukan itu sendiri. Oleh karena itu penting untuk menyusun profil penduduk yang relevan, mutakhir dan lengkap mencakup berbagai indikator sosial ekonomi yang ada.

Perubahan perkembangan indikator dinamika kependudukan yang berbeda antar wilayah dapat disebabkan berbagai faktor. Menurut Zopt (1984) dalam BPS (1997) perubahan komponen atau indikator dinamika kependudukan yang berbeda antar wilayah dapat diakibatkan karena adanya interaksi dari berbagai variabel sosial ekonomi melalui jaringan yang saling mempengaruhi secara kompleks. Namun demikian tingkat perubahan indikator yang sama dalam dua masyarakat yang berbeda belum tentu dapat disimpulkan menjadi hal yang sama.

Sebagai contoh pengalaman program keluarga berencana (KB) di Indonesia dan India, dua negara yang sama-sama memiliki kebijakan kependudukan yang dinyatakan secara eksplisit dan diterapkan secara luas. Di Indonesia program KB dianggap berhasil walaupun status sosial ekonomi masyarakat dinilai tidak meningkat secara cukup signifikan, sebaliknya program tersebut di India dianggap tidak berhasil karena tidak adanya perbaikan status sosial ekonomi dalam masyarakat.

Perbedaan konteks sosial kultural antar kedua negara yang tampaknya menimbulkan perbedaan “nilai” keberhasilan program KB di kedua negara tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa status pembangunan sosial ekonomi yang relatif sama tidak harus berdampak sama terhadap keberhasilan program KB secara massal. Ini tertuang dalam konferensi kependudukan dunia di Bucharest pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku kependudukan, namun perbaikan nilai sosial ekonomi saja bukan merupakan syarat yang cukup bagi keberhasilan kebijakan kependudukan.

Indonesia sendiri termasuk negara yang berhasil menurunkan tingkat fertilitas dengan cepat. Kebijakan kependudukan oleh para pemimpin dunia sudah dideklarasikan sejak tahun 1967. Khusus di Indonesia, kebijakan kependudukan tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1992 yang memperluas tujuan program KB tidak hanya pada penurunan tingkat fertilitas, namun sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga, penundaan usia perkawinan, permasalahan sosial, pengaturan rentang kehamilan, hingga meningkatkan kebahagiaan keluarga dalam norma keluarga kecil bahagia sejahtera (BPS, 2012).

Dari berbagai kajian, terlihat bahwa terjadinya penurunan fertilitas dan mortalitas serta peningkatan mobilitas penduduk di Indonesia telah dan akan mengubah karakteristik penduduk secara signifikan. Contohnya adalah struktur penduduk yang semakin menua, penduduk yang semakin mengkota dengan meningkatnya persentase penduduk perkotaan, serta meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (Ananta dkk, 1993).

Oleh karena itu, perubahan kependudukan yang terjadi begitu cepat harus diimbangi dengan peningkatan mutu dan keberagaman informasi kependudukan yang cepat pula agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. Peningkatan mutu informasi tersebut di antaranya adalah informasi yang akurat, murah, serta mudah didapat (*accessible*) (Muhidin dan Toersilaningih, 2010).

Sesuai dengan visi BPS dalam rangkaian Statcap Cerdas yakni “*Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua*”, penyusunan Profil Penduduk Provinsi

Lampung Tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai permasalahan kebutuhan informasi kependudukan. Kebutuhan informasi kependudukan tidak berhenti pada fertilitas, mortalitas, dan migrasi namun juga menyajikan informasi tentang disabilitas, perumahan hingga lingkungan hidup. Tujuan akhir penyusunan profil ini tentunya agar dapat membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menyusun *grand design* kependudukan yang baik.

1.2. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan publikasi ini untuk memberikan gambaran Profil Penduduk Provinsi Lampung, perkembangannya antar waktu serta variasinya antar kabupaten/kota, jenis kelamin, daerah tempat tinggal atau karakteristik sosial demografi lainnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti:

1. Berapa jumlah penduduk Provinsi Lampung?
2. Bagaimana persebaran antar wilayah (kabupaten/kota)?
3. Bagaimana komposisinya menurut jenis kelamin dan umur?
4. Bagaimana keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi?
5. Bagaimana gambaran penduduk yang mengalami kesulitan fungsional atau disabilitas?
6. Bagaimana kondisi tempat tinggal atau perumahan mereka?
7. Bagaimana pengetahuan penduduk mengenai isu perubahan iklim?

1.3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penyusunan profil ini adalah SUPAS 2015. SUPAS 2015 dirancang untuk mengisi kekosongan data kependudukan antar Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan hanya sekali dalam sepuluh tahun. SUPAS2015 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang dicakup adalah 40.750 blok sensus dengan jumlah rumah tangga sebanyak 652.000. Jumlah sampel yang dicakup di Provinsi Lampung adalah 1.380 blok sensus dengan jumlah rumah tangga sebanyak 22.080.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut: Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penulisan. Bab 2 disajikan gambaran mengenai jumlah dan komposisi penduduk, distribusi penduduk dan bonus demografi. Bab 3 sampai dengan Bab 5 dibahas komponen pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Bab 6 diulas mengenai potret dan distribusi disabilitas. Bab 7 mengenai kondisi perumahan, dan bab 8 mengenai perubahan iklim dilihat dari perspektif rumah tangga.

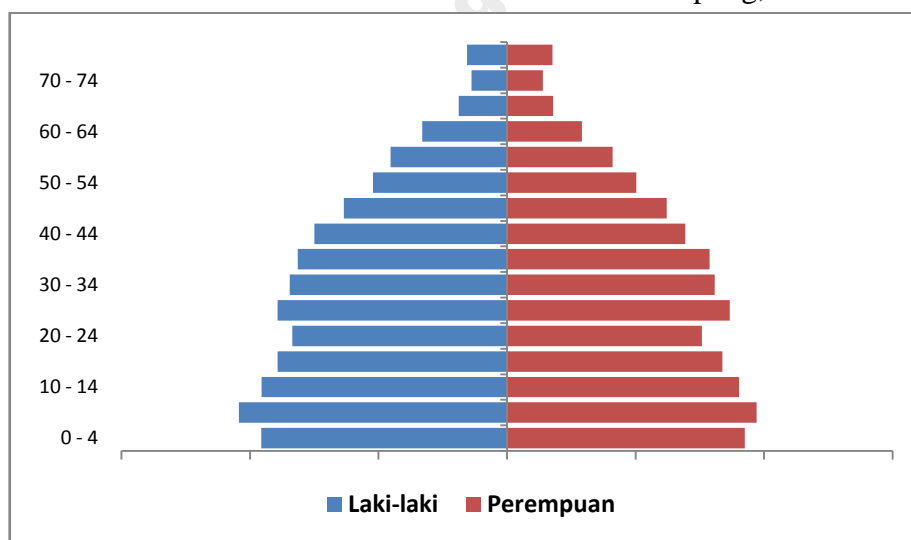
<http://lampung.bps.go.id>

Bab II. Gambaran Umum Kependudukan Provinsi Lampung

2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Terdapat tiga bentuk piramida penduduk. Pertama, **Piramida Expansive**, jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini umumnya terdapat pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan angka kematian tinggi. Kedua, **Piramida Constrictive**, jika penduduk yang berada pada kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara dimana tingkat kelahiran turun dengan cepat dan tingkat kematiannya rendah. Ketiga, **Piramida Stationary**, jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah.

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 2015



Piramida penduduk Provinsi Lampung tahun 2015 terkategori sebagai tipe ekspansif dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Dasar piramida yang relatif lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang relatif tinggi. Sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua. Piramida ekspansif umumnya terdapat pada negara-negara dengan Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya angka kelahiran dan menurunnya tingkat kematian. Berdasarkan hasil Supas 2015, rata-rata anak yang pernah dilahirkan hidup (paritas) di Provinsi Lampung sebesar 2,13, yang artinya wanita usia 15-49 tahun rata-rata melahirkan 2 hingga 3 anak selama masa suburnya.

Tabel 2.1. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	382 250	369 765	752 015	103,38
5-9	417 091	388 476	805 567	107,37
10-14	382 100	360 797	742 897	105,90
15-19	356 936	335 262	692 198	106,46
20-24	334 167	303 193	637 360	110,22
25-29	357 092	346 576	703 668	103,03
30-34	338 246	322 964	661 210	104,73
35-39	325 576	315 372	640 948	103,24
40-44	299 820	277 585	577 405	108,01
45-49	254 016	248 329	502 345	102,29
50-54	208 616	200 931	409 547	103,82
55-59	181 184	164 322	345 506	110,26
60-64	131 708	116 414	248 122	113,14
65-69	75 285	71 607	146 892	105,14
70-75	55 043	55 903	110 946	98,46
75+	62 413	70 562	132 975	88,46
Total	4 161 543	3 948 058	8 109 601	105,41

Berdasarkan data SUPAS 2015, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 8,11 juta jiwa yang terdiri dari 4,16 juta jiwa penduduk laki-laki dan 3,95 juta jiwa penduduk perempuan. Struktur kelompok umur menunjukkan proporsi terbesar penduduk Provinsi Lampung adalah penduduk pada kelompok umur 5-9 tahun. Lebih tingginya proporsi penduduk 5-9 tahun dibanding penduduk 0-4 tahun dapat mengindikasikan turunnya tingkat kelahiran selama lima tahun terakhir dan tingginya angka migrasi risen pada kelompok umur 0-4 tahun. Proporsi terbesar berikutnya adalah kelompok umur balita (0-4 tahun). Dari struktur kelompok umur, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Lampung berada pada kelompok umur muda. Jumlah penduduk mengalami penurunan mulai dari

kelompok umur 25-29 tahun dan semakin sedikit jumlahnya pada kelompok umur tua. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung sebesar 105,41. Rasio di atas 100 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio sebesar 105,41 berarti tiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak sekitar 104 penduduk laki-laki. Untuk penduduk kelompok umur tua (70 tahun ke atas), rasio jenis kelamin di bawah 100 yang berarti pada kelompok umur tersebut penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini diduga terkait angka harapan hidup laki-laki yang lebih rendah dibanding perempuan.

Tabel 2.2. Penduduk menurut Klasifikasi Wilayah di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	209 732	542 283	752 015
5-9	225 920	579 647	805 567
10-14	205 748	537 149	742 897
15-19	207 087	485 111	692 198
20-24	206 649	430 711	637 360
25-29	197 524	506 144	703 668
30-34	188 230	472 980	661 210
35-39	180 224	460 724	640 948
40-44	155 748	421 657	577 405
45-49	152 445	349 900	502 345
50-54	114 407	295 140	409 547
55-59	97 416	248 090	345 506
60-64	65 957	182 165	248 122
65-69	39 211	107 681	146 892
70-75	28 187	82 759	110 946
75+	33 429	99 546	132 975
Total	2 307 914	5 801 687	8 109 601

Penentuan pembagian wilayah ke dalam klasifikasi perkotaan dan perdesaan ditentukan oleh persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan, sedangkan perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sekitar 71,54 persen penduduk Provinsi Lampung berada di wilayah perdesaan, Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

yaitu sebanyak 5,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Provinsi Lampung tidak memiliki akses ke fasilitas-fasilitas perkotaan.

2.2. Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8,11 juta jiwa menyebar di 15 kabupaten/kota. Persentase terbesar penduduk Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur masing-masing 15,27 persen dan 12,34 persen. Sedangkan persentase yang terkecil berada di Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Metro yaitu masing – masing sebesar 1,85 persen dan 1,95 persen.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total Penduduk	Luas Wilayah ^{*)}	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	292 927	3,61	2 142,78	136,70
Tanggamus	573 268	7,07	3 020,64	189,78
Lampung Selatan	971 807	11,98	700,32	1 387,66
Lampung Timur	1 007 893	12,43	5 325,03	189,27
Lampung Tengah	1 238 097	15,27	3 802,68	325,59
Lampung Utara	605 822	7,47	2 725,87	222,25
Way Kanan	432 526	5,33	3 921,63	110,29
Tulang Bawang	429 048	5,29	3 466,32	123,78
Pesawaran	425 964	5,25	2 243,51	189,86
Pringsewu	386 550	4,77	625,00	618,48
Mesuji	195 592	2,41	2 184,00	89,56
Tulang Bawang Barat	264 474	3,26	1 201,00	220,21
Pesisir Barat	149 732	1,86	2 907,23	51,50
Bandar Lampung	977 686	12,06	296,00	3 302,99
Metro	158 215	1,95	61,79	2 560,53
Total	8 109 601	100,00	34 624,00	234,22

^{*)} Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, wilayah paling padat di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung sebanyak 3.303 jiwa, berarti setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 3 ribu jiwa penduduk. Setelah itu disusul Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan masing-masing 2.561 jiwa dan 1.388 jiwa.

Wilayah dengan kepadatan penduduk terjarang adalah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 52 jiwa penduduk.

Tabel 2.4. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	155 613	137 314	292 927	113,33
Tanggamus	298 957	274 311	573 268	108,98
Lampung Selatan	499 191	472 616	971 807	105,62
Lampung Timur	515 822	492 071	1 007 893	104,83
Lampung Tengah	630 730	607 367	1 238 097	103,85
Lampung Utara	308 078	297 744	605 822	103,47
Way Kanan	224 935	207 591	432 526	108,35
Tulang Bawang	222 489	206 559	429 048	107,71
Pesawaran	219 458	206 506	425 964	106,27
Pringsewu	198 212	188 338	386 550	105,24
Mesuji	102 391	93 201	195 592	109,86
Tulang Bawang Barat	135 748	128 726	264 474	105,45
Pesisir Barat	78 638	71 094	149 732	110,61
Bandar Lampung	492 208	485 478	977 686	101,39
Metro	79 073	79 142	158 215	99,91
Total	4 161 543	3 948 058	8 109 601	105,41

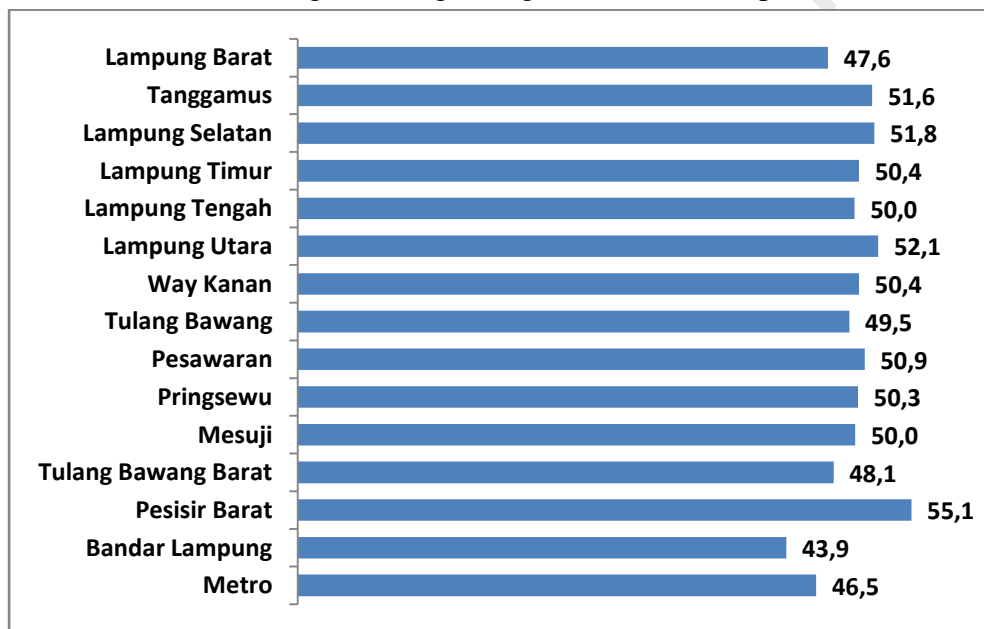
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk di semua kabupaten/kota berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa di semua kabupaten/kota jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 113,33. Pada setiap 100 penduduk wanita di Kabupaten Lampung Barat terdapat sekitar 113 penduduk laki-laki. Sementara perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang terendah berada di Kota Metro sebesar 99,91.

2.3. Tantangan Masa Depan: Bonus Demografi

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat dikategorikan menjadi kelompok usia produktif dan non produktif yaitu usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun merupakan penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang lain,

baik orang tua maupun orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena pada umumnya sudah tidak lagi aktif secara ekonomi. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja atau seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif. Perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif digambarkan dalam sebuah Angka Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ketergantungan atau rasio beban ketergantungan memberikan gambaran ekonomi penduduk dari sisi demografi.

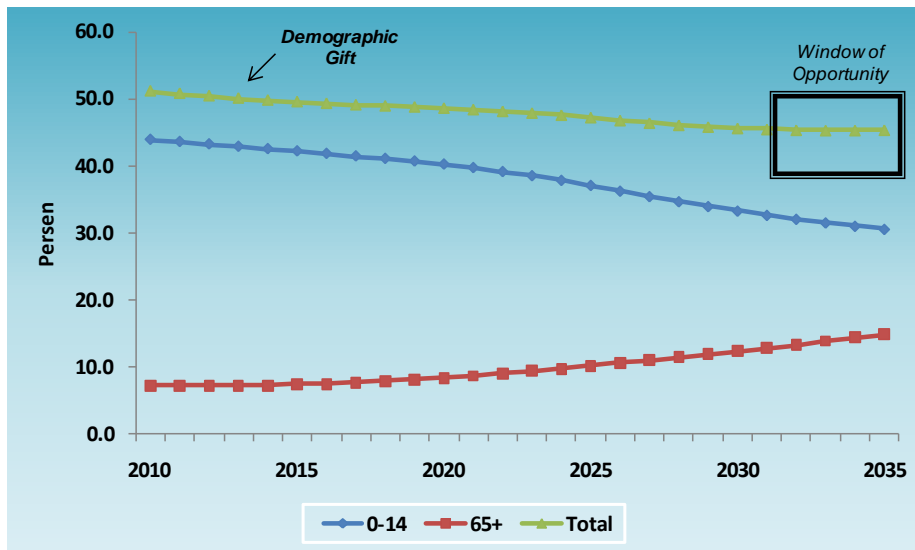
Gambar 2.2. Angka Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota



Pada tahun 2015, angka ketergantungan di Provinsi Lampung sebesar 49,67 atau dapat dikatakan bahwa 100 orang produktif akan menanggung sekitar 49 hingga 50 orang non produktif atau kurang lebih 2 berbanding 1. Kejadian bonus demografi di suatu wilayah akan dialami pada saat Angka Ketergantungan berada di bawah 50 yang artinya wilayah tersebut tersedia penduduk usia produktif yang cukup banyak. Adanya bonus demografi akan memunculkan suatu kesempatan (*window of opportunity*) bagi suatu wilayah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. *The window of opportunity* akan terbuka ketika angka

ketergantungan mencapai titik terendah. Kondisi ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan.

Gambar 2.3. Bonus Demografi di Provinsi Lampung



Bonus demografi di Provinsi Lampung sudah dimulai sejak tahun 2014 di mana angka ketergantungan sekitar 49,8 persen (di bawah 50 persen). Setelah itu angka ketergantungan terus menurun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2030-2035. Pada periode tersebut menunjukkan angka ketergantungan yang paling rendah yakni antara 45,3 persen sampai dengan 45,6 persen. Setelah periode tersebut diperkirakan angka ketergantungan akan meningkat lagi karena adanya kenaikan penduduk tua (65 tahun ke atas).¹

Perlu diperhatikan bahwa kesempatan yang diberikan oleh bonus demografi berupa *the window of opportunity* ini tidak terjadi selamanya, melainkan hanya tersedia dalam waktu yang sangat singkat, satu atau dua dekade saja. Oleh karena itu, faktor yang

¹ Pergerakan struktur umur yang dinamis menyebabkan bonus demografi hanya terjadi pada satu periode tertentu dan akan berlalu setelah itu. Karena sifat bonus tersebut, apabila suatu negara tidak dapat memanfaatkannya pada periode yang tepat, mereka harus menghadapi masalah berikutnya yaitu peningkatan rasio jumlah penduduk lanjut usia. Fenomena ini yang dinamakan **bonus demografi pertama**. Di lain pihak, apabila penduduk usia produktif bersifat *forward looking* yaitu berlaku sadar untuk menyiapkan kebutuhan masa pensiun, akumulasi aset dapat bersifat permanen apabila digunakan dalam bentuk yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini yang dinamakan **bonus demografi kedua** (Mason, 2005 dikutip dari Maliki 2010).

menentukan keberhasilan pemanfaatan momentum ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Akan tetapi, beberapa fakta yang ada saat ini justru sebaliknya.

Pertama, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) memperlihatkan kenaikan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*, TFR) dari 2,5 (2007) naik menjadi 2,7 (2012). Besaran TFR ini lebih tinggi dari angka nasional (2,6), jauh dari *replacement level* (2,1) bahkan di atas angka proyeksi (2,6). Padahal, angka *Contraception Prevalence Rate* (CPR) merupakan yang tertinggi se-Indonesia yakni sebesar 70,3 persen. Artinya, dari 100 perempuan berusia 15-49 tahun yang berstatus kawin 70 perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Bandingkan dengan angka nasional sebesar 61,9 persen dan standar CPR 70 persen (untuk mencapai TFR 2,1), maka besaran CPR tersebut seharusnya berpengaruh positif bagi penurunan angka kelahiran. Bila yang terjadi sebaliknya perlu ditelusuri penyebabnya, sehingga CPR yang tinggi sejalan dengan penurunan fertilitas. Bila kenaikan TFR terus terjadi maka *the window of opportunity* bisa berubah menjadi *the door of disaster*.

Kedua, kualitas sumber daya manusia sebagai modal manusia di masa mendatang masih memprihatinkan. Berdasarkan data SUPAS 2015, tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas sebagian besar (lebih dari 50 persen) hanya SD sederajat. Sementara itu, angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 masing-masing sebesar 96,23 persen, 90,51 persen, 67,59 persen dan 24,31 persen. Padahal, pembangunan ekonomi membutuhkan modal manusia yang berkualitas, baik pendidikan, kesehatan dan faktor *endowment* lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, dapat dibayangkan bagaimana kualitas modal manusia di Provinsi Lampung dalam menyongsong *the window of opportunity*.

Ketiga, penyerapan tenaga kerja oleh lapangan usaha belum optimal. Di bulan Agustus 2016 tercatat jumlah pengangguran di Provinsi Lampung sebanyak 190,3 ribu atau sekitar 4,62 persen. Meskipun relatif rendah dibanding angka nasional sebesar 5,61 persen, akan tetapi sekitar 70,1 persen bekerja di sektor

informal. Padahal sektor informal identik dengan produktivitas yang rendah.² Pada saat *window of opportunity* terbuka, proporsi penduduk usia kerja akan semakin besar dibanding dengan proporsi penduduk muda. Apabila terserap dalam pasar kerja dan mempunyai pekerjaan yang produktif, maka produksi per kapita akan meningkat. Bila yang terjadi sebaliknya, tingkat pengangguran tinggi, atau produktivitasnya rendah maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan akan pupus.

<http://lampung.bps.go.id>

² Sektor informal berkorelasi erat dengan sektor pertanian. Di tahun 2016, proksi produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian sekitar 37,66 juta rupiah atau merupakan yang paling rendah dibanding sektor ekonomi lainnya.

Bab III. Fertilitas dan Keluarga Berencana

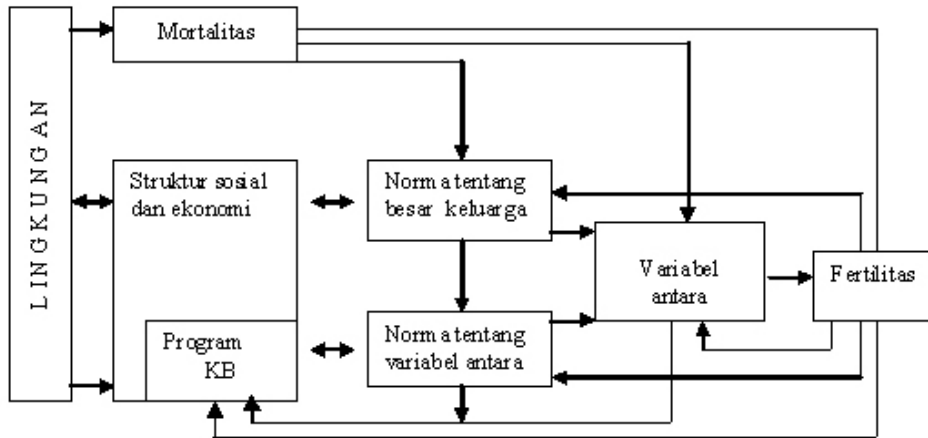
3.1. Pola Fertilitas di Provinsi Lampung

Sebagaimana diketahui, di dalam membuat konsepsi teori dari fertilitas ini, Ronald Freedman (1975) dalam BPS (1984) menggunakan pemikiran Kingsley Davis dan Judith Blake (1956). Buah pikiran dua sarjana sosiologi ini berbunyi: Variabel yang langsung mempengaruhi fertilitas ialah faktor yang langsung berkaitan dengan tahap-tahap terjadinya reproduksi, dan variabel ini dinamakan variabel antara. Variabel antara dibagi dalam 3 kelompok besar. Pembagian ke dalam 3 kelompok besar ini berkaitan dengan adanya 3 tahap reproduksi, yaitu tahap hubungan kelamin (*intercourse*), tahap pembuahan (*conception*) dan tahap kehamilan (*gestation*). Kelompok antara yang pertama, kelompok “*Intercourse variable*” terdiri atas 6 variabel yaitu: a) Umur mulai hubungan kelamin; b) Selibat permanen; c) Lamanya berstatus kawin; d) Abstinesi sukarela; e) Abstinesi terpaksa; dan f) Frekuensi sanggama. Sedangkan kelompok kedua, yaitu kelompok “*Conception variable*” terdiri atas: a) Kesuburan atau kemandulan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja; b) Pemakaian kontrasepsi; dan c) Kesuburan atau kemandulan yang disebabkan faktor-faktor kesengajaan. Akhirnya, kelompok ketiga yaitu “*Gestation variable*” terdiri atas: a) Mortalitas janin karena sebab-sebab yang tak disengaja; b) Mortalitas janin karena hal-hal yang disengaja. Menurut Freedman, fertilitas secara langsung hanya dipengaruhi oleh variabel antara. Sedangkan fertilitas itu sendiri mempengaruhi tingkat kematian, norma besarnya keluarga, variabel antara serta norma-norma tentang variabel antara tersebut.

Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa variabel-variabel antara tersebut dipengaruhi oleh tingkat kematian, norma tentang besarnya keluarga, struktur sosial ekonomi dimana program KB merupakan bagian daripadanya dan norma tentang variabel antara. Sebaliknya variabel antara ini mempengaruhi norma besarnya keluarga dan norma tentang variabel antara. Sementara itu norma tentang variabel antara dipengaruhi oleh norma besarnya keluarga yang sebelumnya sudah

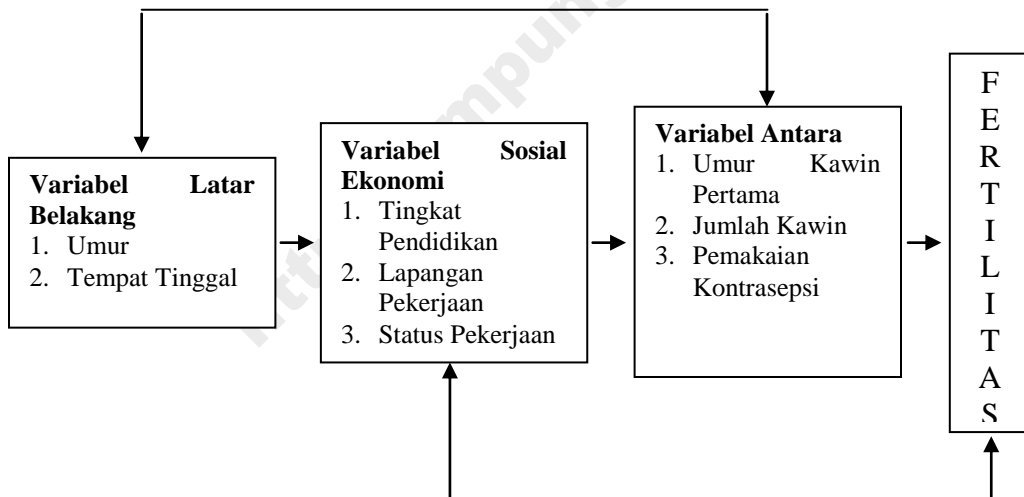
dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, tingkat fertilitas, struktur sosial ekonomi dan variabel antara.

Gambar 3.1. Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas oleh Ronald Freedman



Setelah dilakukan penyederhanaan, variabel-variabel yang digunakan dapat dikelompokkan dan disusun di dalam diagram di bawah ini.

Gambar 3.2. Skema Hubungan Kausal dalam Analisa Fertilitas



3.1.1. Paritas menurut Umur Wanita

Tabel 3.1 memperlihatkan rata-rata anak yang dilahirkan hidup (rata-rata paritas) menurut umur wanita untuk tahun 2010 dan 2015. Secara keseluruhan wanita di Provinsi Lampung mempunyai rata-rata anak 2 orang. Apabila dilihat menurut kelompok umur wanita, rata-rata paritas tersebut menunjukkan angka yang

makin besar yang lazim disebut dengan fertilitas kumulatif. Angka paritas terbesar terlihat pada wanita umur 45-49 tahun yaitu sebesar 3,18 orang anak. Mengingat bahwa usia ini adalah usia menjelang atau saat menopause maka dapat diharapkan bahwa pada usia ini wanita mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk memperoleh anak lagi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa angka sebesar 3,18 tadi merupakan paritas lengkap, artinya wanita yang telah menyelesaikan masa reproduksinya rata-rata mempunyai anak 3 orang.

Tabel 3.1. Rata-rata Anak yang Pernah Dilahirkan Hidup (Paritas) menurut Umur Wanita Pernah Kawin di Provinsi Lampung, 2010 dan 2015

Umur Wanita	Rata-rata Anak Lahir Hidup	
	2010 ^{*)}	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)
15 – 19	0,52	0,58
20 – 24	0,90	0,94
25 – 29	1,39	1,35
30 – 34	2,06	1,92
35 – 39	2,68	2,43
40 – 44	3,23	2,81
45 – 49	3,66	3,18
Rata-rata Paritas	2,26	2,13

^{*)} Sensus Penduduk 2010

^{**)} Survei Penduduk Antar Sensus 2015, informasi Anak Lahir Hidup ditanyakan pada Wanita Pernah Kawin berumur 10 – 54 tahun.

Dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2010, angka paritas wanita pada usia yang sama yaitu 45-49 tahun, angka pada tahun 2015 ini kelihatan lebih rendah (3,18 dibandingkan 3,66 pada tahun 2010). Namun, hal ini hendaknya diinterpretasikan secara hati-hati dengan melihat perbandingan masing-masing kelompok umur wanita. Pada kelompok wanita dengan usia termuda yaitu wanita pernah kawin umur 15-24 tahun, jelas terlihat bahwa rata-rata paritas wanita-wanita ini lebih tinggi di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2010. Seperti misalnya wanita umur 15-19 tahun di tahun 2015 rata-rata mempunyai paritas sebesar 0,58 dibanding 0,52 anak di tahun 2010, demikian pula wanita umur 19-24 tahun.

3.1.2. Paritas menurut Tempat Tinggal

Tabel 3.2 memperlihatkan paritas wanita menurut tempat tinggal pada saat pencacahan. Secara keseluruhan terlihat bahwa rata-rata paritas wanita kota relatif lebih tinggi dibanding wanita desa. Wanita kota rata-rata mempunyai anak sebanyak 2,18 orang dan wanita desa sebanyak 2,11 orang. Dilihat menurut kelompok umur, perbedaan paritas wanita antara antara kedua tempat tinggal ini sukar ditentukan polanya. Pada usia muda, 15-24 tahun wanita desa kelihatan mempunyai anak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita kota. Sedangkan pada usia 25-39 tahun wanita desa terlihat mempunyai anak yang lebih sedikit.

Tabel 3.2. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur dan Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2015

Umur Wanita	Tempat Tinggal		Total
	Kota	Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 19	0,45	0,61	0,58
20 – 24	0,90	0,95	0,94
25 – 29	1,39	1,34	1,35
30 – 34	1,92	1,92	1,92
35 – 39	2,48	2,42	2,43
40 – 44	2,72	2,84	2,81
45 – 49	3,05	3,24	3,18
Rata-rata Paritas	2,18	2,11	2,13

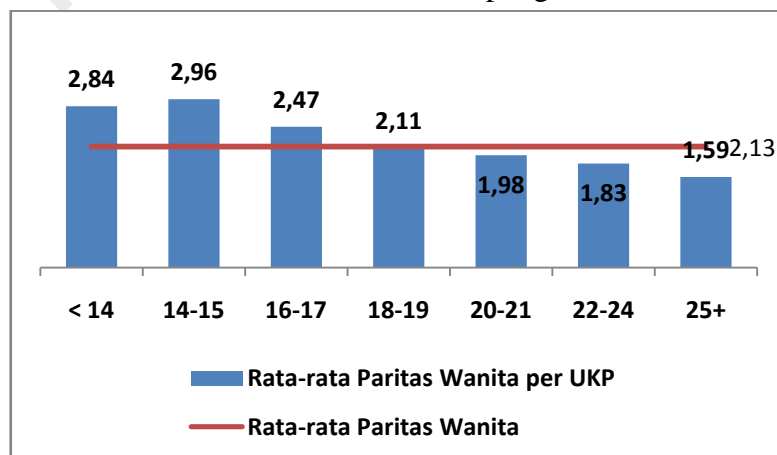
Mengapa terjadi hal yang seperti ini? Kiranya sulit untuk menentukan jawaban yang tepat mengingat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pola tingkah laku fertilitas yang terdapat di kota maupun di desa. Misalnya, apabila memang sejak kecil para wanita kota itu telah tinggal di kota, pola berpikir mereka tentu akan cenderung sama dengan orang kota yang dalam hal ini tentu lebih terbuka atau lebih banyak memperoleh pengetahuan, pendidikan, komunikasi dan lain-lain. Orang-orang kota biasanya dianggap mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta kemudian menunda perkawinan mereka. Ada kemungkinan juga bahwa wanita desa mempunyai tingkat kesuburan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita kota, mungkin karena kesehatan maupun gizi. Adioetomo (1981) menemukan bahwa wanita desa ternyata menikah lebih muda tetapi menunggu kelahiran bayi pertama relatif lebih lama dibanding dengan wanita

kota. Tanpa melihat faktor-faktor ini semacam ini secara keseluruhan akan sulit kiranya memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai sebab-sebab perbedaan paritas desa dan kota.

3.1.3. Paritas menurut Usia Kawin

Dalam suatu masyarakat dimana sanggama di luar nikah tidak lazim terjadi, serta hubungan suami isteri dilaksanakan segera setelah upacara pernikahan, maka usia kawin wanita dapat disamakan dengan usia pada saat memasuki masa ekspose menjadi hamil (*“age at entry into union”*). Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa wanita yang kawin muda sekitar 15 tahun ternyata tidak segera memasuki hubungan suami isteri setelah upacara pernikahan (Gille dan Pardoko, 1966; Hull, 1976; Singarimbun dan Manning, 1974 dalam BPS, 1984). Namun para peneliti ini juga menegaskan bahwa penundaan hubungan suami isteri itu terjadi terutama pada mereka yang pada saat survei sudah tua (40 ke atas) dan umumnya karena pernikahan yang diatur oleh orang tua. Masyarakat Indonesia, pada umumnya masih belum menerima hubungan sanggama sebelum nikah. Selain itu juga ada indikasi bahwa perkawinan yang diatur oleh orang tua telah sangat berkurang (Kasto, 1982; Muliakusuma, 1976). Dengan demikian kita dapat menganggap usia saat memasuki masa ekspose terhadap kehamilan, jadi sebagai variabel antara yang langsung mempengaruhi fertilitas.

Gambar 3.1. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung, 2015



Angka dalam Gambar 3.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata paritas yang dipunyai oleh wanita Lampung yang menikah pada usia yang lebih muda adalah lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata paritas wanita yang menikah pada usia yang lebih tua. Dengan demikian terdapat pola hubungan yang bersifat negatif antara umur kawin dengan fertilitas. Wanita yang menikah pada usia termuda yaitu kurang dari 14 tahun mempunyai anak satu orang lebih banyak dibandingkan wanita yang menikah pada usia 25 tahun atau lebih.

Bagaimana sebenarnya pengaruh usia kawin terhadap fertilitas ini terjadi? Ini tergantung pada apakah fertilitas alami (*natural fertility*) ataukah dalam kondisi fertilitas terkontrol (*controlled fertility*) (Henry, 1976:94-98). Menurut Henry, dalam fertilitas yang bersifat alami, dimana pemakaian kontrasepsi masih merupakan hal yang langka, maka pengaruh usia kawin semata-mata akan terlihat pada panjang pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan. Wanita yang kawin muda mempunyai masa ekspose terhadap kehamilan yang lebih panjang dibandingkan dengan wanita lain yang menikah lebih tua. Perbedaan paritas ditentukan oleh perbedaan panjang pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan ini. Pada masyarakat yang dengan sadar telah melakukan perencanaan keluarga, maka besar kecilnya risiko terhadap kehamilan dapat diatur dengan pemakaian kontrasepsi. Wanita dapat saja menikah pada usia muda dan menunda kelahiran anak pertama dengan pemakaian kontrasepsi. Wanita yang menikah lebih tua pada umumnya mempunyai anak lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menikah lebih muda. Gejala ini lazim disebut dengan gejala “*catching up*”, dimana wanita yang menikah lebih tua ingin mengejar ketinggalan melahirkan anak-anak mereka dan berusaha mencapai jumlah anak yang diinginkan secepat mungkin.

3.1.4. Paritas menurut Banyaknya Perkawinan

Di luar pemakaian kontrasepsi, lamanya seorang wanita berada dalam status perkawinan menentukan panjangnya masa ekspose hamil. Sebagai salah satu variabel antara, lamanya berada dalam status pernikahan ini dapat diinterpretasikan dari data mengenai banyaknya perkawinan yang dialami oleh seorang wanita, terutama bila dikontrol menurut usia kawin. Seorang wanita yang mengalami

kawin cerai akan mengalami masa ekspose menjadi hamil yang terpotong yaitu di saat-saat antara perceraian dengan perkawinan berikutnya. Berarti seorang wanita yang sering mengalami kawin cerai akan mengalami masa ekspose yang lebih pendek dan dengan demikian diharapkan akan mempunyai anak lebih sedikit dibandingkan dengan wanita lain yang senantiasa berada dalam status kawin.

Tabel 3.3. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur dan Jumlah Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015

Umur Wanita	Jumlah Perkawinan			Total
	1	2	3+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15 – 19	0,56	1,00	-	0,58
20 – 24	0,93	1,39	1,00	0,94
25 – 29	1,34	1,79	1,85	1,35
30 – 34	1,91	2,26	2,06	1,92
35 – 39	2,43	2,60	3,38	2,43
40 – 44	2,84	2,88	3,04	2,81
45 – 49	3,24	3,08	2,82	3,18
Rata-rata Paritas	2,12	2,61	2,58	2,13

Tabel 3.3 menyajikan data mengenai paritas menurut jumlah perkawinan dan paritas wanita. Ternyata rata-rata paritas wanita di Provinsi Lampung tahun 2015 ini tidak menunjukkan pola hubungan seperti yang diharapkan di atas. Di sini bahkan terlihat bahwa secara keseluruhan wanita yang menikah lebih dari sekali bahkan mempunyai anak lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang menikah sekali. Wanita yang menikah sekali mempunyai rata-rata paritas sebesar 2,12, sedang wanita yang menikah 2 kali mempunyai paritas sebesar 2,61 dan yang kawin lebih dari 2 kali berparitas 2,58.

Tabel 3.4. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama dan Jumlah Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015

Umur Wanita	Jumlah Perkawinan			Total
	1	2	3+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 14	3,52	3,10	5,92	2,84
14 - 15	2,93	3,25	3,57	2,96
16 – 17	2,45	2,81	3,80	2,47
18 – 19	2,09	2,44	2,18	2,11
20 – 21	1,96	2,54	1,79	1,98
22 – 24	1,82	2,09	2,14	1,83
25+	1,59	1,67	2,08	1,59
Rata-rata Paritas	2,12	2,61	2,58	2,13

3.1.5. Paritas dan Status Pemakaian Alat Kontrasepsi

Pemakaian alat kontrasepsi akan mempengaruhi fertilitas wanita melalui status fekunditasnya. Melalui pemakaian kontrasepsi wanita dapat mengatur panjang pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan. Ini dapat terjadi dengan mengatur jarak antara kehamilan yang akan berakibat pada tempo atau saat-saat kelahiran anak-anak mereka (“*spacing*”), atau dengan jalan memotong sama sekali ekspose terhadap kehamilan tadi apabila dirasa bahwa banyaknya anak yang dipunyai telah memenuhi keinginan (“*stopping*”).

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa yang memakai kontrasepsi akan mempunyai anak yang lebih banyak dibandingkan yang dengan wanita yang tidak memakai kontrasepsi.

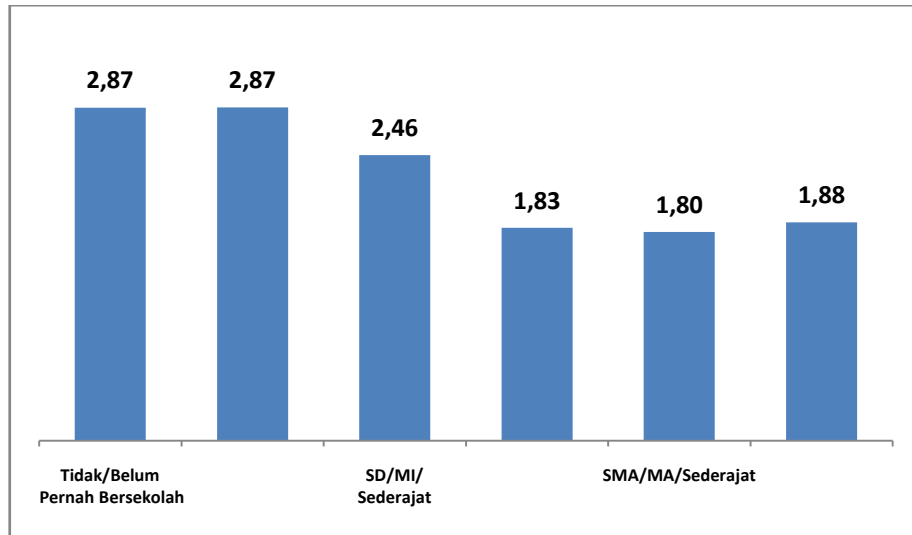
Tabel 3.5. Rata-rata Paritas dan Persentase Wanita Berstatus Pernah Kawin, Pemakaian Alat KB dan Umur Wanita di Provinsi Lampung, 2015

Umur Wanita	Status Pemakaian Alat KB		Total
	Sedang Pakai	Tidak Pakai	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 19	1,00	0,18	0,58
20 – 24	1,11	0,55	0,94
25 – 29	1,48	1,04	1,35
30 – 34	2,07	1,54	1,92
35 – 39	2,54	2,21	2,43
40 – 44	2,96	2,56	2,81
45 – 49	3,24	3,21	3,18
Rata-rata Paritas	2,22	1,97	2,13

3.1.6. Paritas menurut Pendidikan

Gambar 3.2 memperlihatkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan paritas berbentuk seperti huruf U terbalik. Paritas tertinggi dimiliki oleh wanita yang tidak/belum pernah bersekolah atau tidak punya ijazah SD, lalu mengalami penurunan sampai dengan wanita dengan pendidikan tamat SMA. Setelah itu paritas meningkat kembali pada wanita dengan pendidikan tamat akademi/universitas.

Gambar 3.2. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015



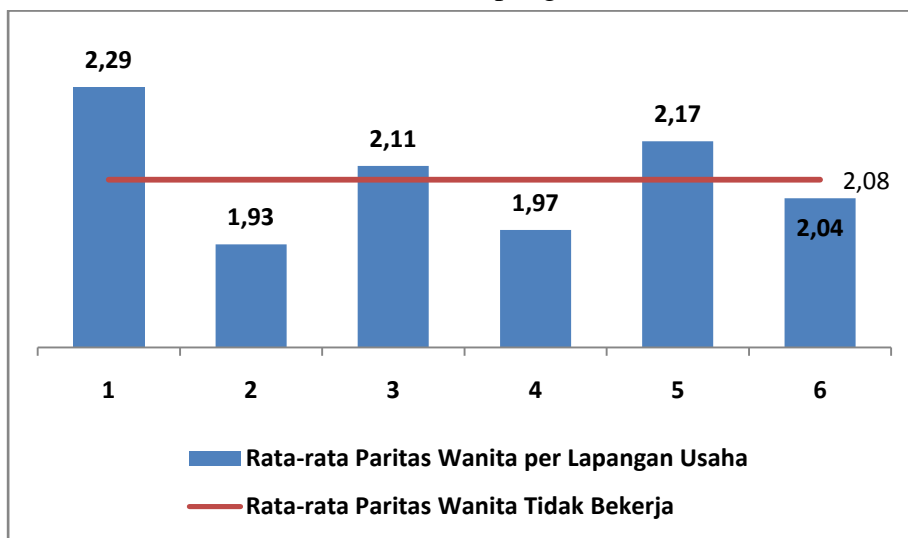
3.1.7. Paritas menurut Pekerjaan Wanita

Bagi wanita 'bekerja' merupakan alternatif lain dari pekerjaan mengurus rumah tangga. Para wanita yang 'bekerja' sambil mengurus rumah tangga akan merasakan adanya konflik antara karir dan kehidupan keluarga. Selanjutnya wanita yang 'bekerja' akan merasa terganggu akan kehadiran banyaknya anak-anak. Atas dasar alasan inilah maka hipotesa yang berkembang di negara maju adalah bahwa wanita yang bekerja akan mempunyai anak yang lebih sedikit dibanding mereka yang tidak bekerja. Blake (1965) dalam BPS (1984) bahkan menyatakan bahwa pekerjaan merupakan faktor penentu fertilitas yang paling kuat sehingga mengarahkan hal ini sebagai kebijaksanaan kependudukan baik bagi negara maju maupun berkembang.

Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa paritas wanita yang bekerja di sektor-sektor tertentu (Pertanian, Perdagangan atau Jasa Lainnya) relatif lebih tinggi dibanding paritas wanita yang tidak bekerja. Hal ini sejalan dengan Hull (1977) dalam BPS (1984) yang menyatakan bahwa di negara berkembang, yang sebagian besar penduduknya berdiam di daerah perdesaan, yang lazim digolongkan sebagai wanita bekerja adalah mereka yang pekerjaannya terutama di sawah, membantu suaminya mengelola sawah, berdagang sayur, kue di pasar-pasar di desanya,

mengerjakan produk-produk kerajinan tangan serta jasa yang umumnya diperlukan dalam masyarakat tradisional. Dari pekerjaan wanita pada masyarakat tradisional semacam ini sukar diharapkan adanya pengaruh terhadap banyaknya anak yang dipunyai. Wanita dapat mengerjakan sawah, menganyam tikar atau berjualan di pasar sambil membawa bayinya. Kehadiran bayi tersebut tidak mengganggu pekerjaannya.

Gambar 3.3. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015

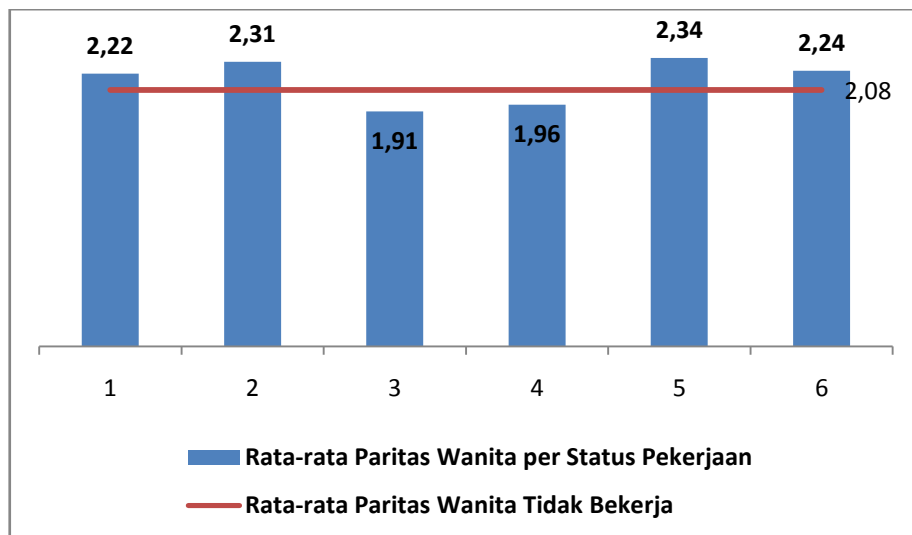


Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
4. Jasa Pendidikan
5. Jasa Lainnya
6. Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kondisi yang sama terlihat pada paritas wanita menurut status pekerjaan. Wanita yang bekerja di sektor informal cenderung memiliki paritas yang relatif lebih tinggi dibanding wanita yang tidak bekerja. Hanya wanita yang bekerja berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai yang memiliki paritas relatif lebih rendah dibanding wanita yang tidak bekerja.

Gambar 3.4. Rata-rata Paritas Wanita Pernah Kawin menurut Status Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015



Keterangan:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga/tidak dibayar

3.2. Keadaan Program Keluarga Berencana Indonesia

3.2.1. Pemakaian Kontrasepsi menurut Karakteristik Latar Belakang

Sekitar 70,28 persen wanita berstatus kawin umur 15-49 tahun menggunakan kontrasepsi. Metode tradisional tidak umum digunakan di Provinsi Lampung, 69,69 persen pemakai kontrasepsi menggunakan metode modern dan 0,59 persen pemakai kontrasepsi menggunakan metode tradisional. Suntikan KB adalah metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan diikuti oleh pil masing-masing sebesar 45,75 persen dan 13,16 persen.

Wanita yang lebih muda (umur 15-19 tahun) dan yang lebih tua (45-49 tahun) lebih sedikit yang memakai kontrasepsi dibanding dengan wanita pada pertengahan usia subur (20-44 tahun). Pemakaian kontrasepsi pada wanita kawin semua kelompok umur didominasi oleh metode kontrasepsi modern. Namun, preferensi untuk metode tertentu bervariasi menurut umur. Meskipun suntik KB paling banyak digunakan pada setiap kelompok umur. Metode ini paling populer di Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

kalangan wanita di bawah usia 30 tahun. Pada kelompok wanita yang lebih tua (30-44 tahun), selain suntikan KB, pemakaian pil dan metode kontrasepsi jangka panjang (sterilisasi wanita, IUD) lebih tinggi daripada wanita yang lebih muda.

Tabel 3.6. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Kelompok Umur dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015

Alat/Cara KB	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 49	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Suatu Cara	66,55	73,22	74,18	55,53	70,28
Suatu Cara Modern	66,28	72,73	73,49	54,68	69,69
Sterilisasi Wanita	0,24	0,70	2,03	2,09	1,31
Sterilisasi Pria	0,00	0,07	0,25	0,63	0,20
IUD	1,32	2,34	2,89	2,93	2,49
Suntikan	52,53	50,95	44,62	28,47	45,75
Susuk KB	4,90	5,53	7,45	5,50	6,13
Pil	7,22	12,50	15,40	14,50	13,16
Kondom	0,08	0,64	0,81	0,56	0,62
Lainnya	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01
Suatu Cara Tradisional	0,27	0,49	0,69	0,86	0,59
MAL	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02
Pantang Berkala	0,00	0,21	0,44	0,60	0,32
Senggama Terputus	0,05	0,08	0,08	0,15	0,09
Lainnya	0,22	0,16	0,17	0,11	0,16
Tidak Pakai	33,45	26,78	25,82	44,47	29,72
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah WPK 15-49 Tahun	190.898	603.133	556.962	219.779	1.570.772

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa angka prevalensi kontrasepsi lebih tinggi di daerah perdesaan dibanding di daerah perkotaan masing-masing 72,49 persen dan 64,14 persen. Namun, untuk penggunaan metode kontrasepsi tertentu, wanita di perkotaan lebih tinggi prevalensinya. Hanya pada penggunaan suntikan KB wanita di perkotaan memiliki persentase yang lebih kecil dibanding dengan wanita di perdesaan masing-masing 37,23 persen dan 48,82 persen. Susuk KB lebih populer di kalangan wanita di perdesaan daripada wanita di perkotaan. Sebaliknya, wanita di perkotaan lebih cenderung menggunakan sterilisasi wanita, IUD dan kondom dibanding dengan wanita di perdesaan.

Tabel 3.7. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015

Alat/Cara KB	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Suatu Cara	64,14	72,49	70,28
Suatu Cara Modern	63,14	72,05	69,69
Sterilisasi Wanita	1,91	1,10	1,31
Sterilisasi Pria	0,31	0,17	0,20
IUD	5,58	1,38	2,49
Suntikan	37,23	48,82	45,75
Susuk KB	4,40	6,76	6,13
Pil	12,45	13,42	13,16
Kondom	1,26	0,39	0,62
Lainnya	0,00	0,02	0,01
Suatu Cara Tradisional	0,99	0,44	0,59
MAL	0,00	0,02	0,02
Pantang Berkala	0,63	0,21	0,32
Senggama Terputus	0,21	0,04	0,09
Lainnya	0,15	0,16	0,16
Tidak Pakai	35,86	27,51	29,72
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah WPK 15-49 Tahun	415.719	1.155.053	1.570.772

Tabel 3.8 menunjukkan penggunaan kontrasepsi secara umum menurun menurut tingkat pendidikan responden. Penggunaan kontrasepsi tertinggi pada wanita yang berpendidikan SD/MI/ sederajat sebesar 73,18 persen. Kemudian turun menjadi 62,51 persen pada wanita dengan pendidikan perguruan tinggi. Penggunaan metode kontrasepsi bervariasi menurut tingkat pendidikan. Suntikan KB merupakan metode yang populer pada semua kategori pendidikan wanita. Sterilisasi wanita dan IUD paling banyak digunakan oleh wanita berstatus kawin dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Namun mereka lebih banyak menggunakan metode tradisional. Pil merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh wanita dengan tingkat pendidikan SD.

Tabel 3.8. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Pendidikan dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015

Alat/Cara KB	Tidak tamat SD ^{*)}	SD/MI/ sederajat	SMP/MTs/ sederajat	SMA/MA/ sederajat	Perguruan Tinggi ^{**)}	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Suatu Cara	65,68	73,18	72,79	67,69	62,51	70,28
Suatu Cara Modern	65,53	72,79	72,25	66,80	61,29	69,69
Sterilisasi Wanita	1,20	1,01	0,83	1,58	4,10	1,31
Sterilisasi Pria	0,37	0,31	0,04	0,15	0,40	0,20
IUD	1,32	1,23	1,69	3,49	10,04	2,49
Suntikan	38,56	47,97	51,45	42,76	32,15	45,75
Susuk KB	8,89	6,60	5,68	5,68	3,33	6,13
Pil	14,88	15,37	12,07	12,23	8,90	13,16
Kondom	0,31	0,29	0,45	0,89	2,36	0,62
Lainnya	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
Suatu Cara Tradisional	0,15	0,39	0,54	0,89	1,22	0,59
MAL	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,02
Pantang Berkala	0,07	0,17	0,26	0,57	0,76	0,32
Senggama Terputus	0,00	0,03	0,14	0,13	0,08	0,09
Lainnya	0,08	0,20	0,08	0,19	0,39	0,16
Tidak Pakai	34,32	26,82	27,21	32,31	37,49	29,72
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah WPK 15-49 Tahun	162.186	461.626	466.719	378.770	101.471	1.570.772

*) Termasuk yang tidak/belum pernah bersekolah

**) Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, S2 dan S3

Penggunaan kontrasepsi menurun menurut jumlah anak masih hidup yang dimiliki. Penggunaan kontrasepsi berkisar antara 74,58 persen di kalangan wanita dengan 1 atau 2 anak masih hidup. Kemudian turun menjadi 57,25 persen untuk wanita dengan 5 anak masih hidup atau lebih. Wanita berstatus kawin umur 15-49 tahun yang belum memiliki anak 96,28 persen tidak memakai alat kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang paling populer di antara wanita yang memiliki anak satu atau dua yang masih hidup adalah suntikan KB. Proporsi wanita yang menggunakan sterilisasi meningkat dari 2,59 persen untuk wanita dengan 3 atau 4 anak menjadi 4,52 persen untuk wanita dengan 5 anak atau lebih.

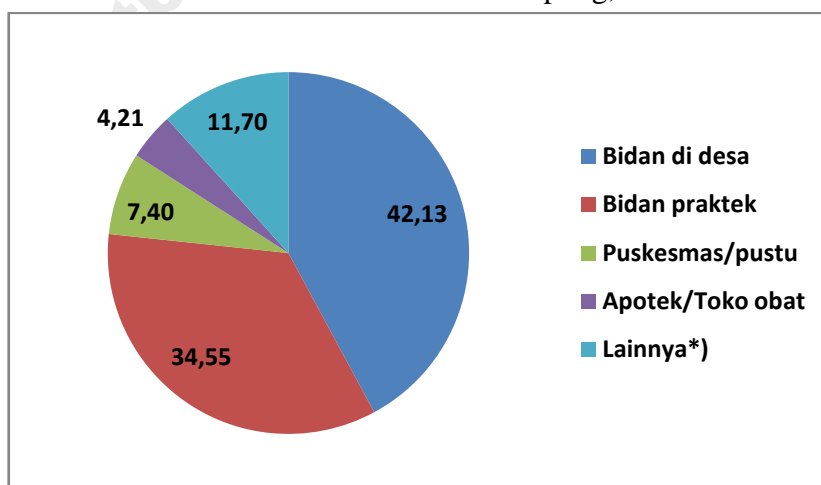
Tabel 3.9. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Jumlah Anak Masih Hidup dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Lampung, 2015

Alat/Cara KB	0	1 - 2	3 - 4	5+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Suatu Cara	3,72	74,58	74,94	58,01	70,28
Suatu Cara Modern	3,50	73,97	74,38	57,25	69,69
Sterilisasi Wanita	0,00	0,73	2,59	4,52	1,31
Sterilisasi Pria	0,00	0,04	0,60	0,64	0,20
IUD	0,22	2,38	3,43	1,30	2,49
Suntikan	2,30	50,62	44,21	33,30	45,75
Susuk KB	0,31	5,81	8,23	5,67	6,13
Pil	0,65	13,84	14,25	11,82	13,16
Kondom	0,00	0,55	1,03	0,00	0,62
Lainnya	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01
Suatu Cara Tradisional	0,22	0,62	0,56	0,75	0,59
Tidak Pakai	96,28	25,42	25,06	41,99	29,72
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah WPK 15-49 Tahun	83.513	1.025.862	401.643	59.754	1.570.772

3.2.2. Sumber Pelayanan Kontrasepsi

Informasi yang berhubungan dengan sumber pelayanan kontrasepsi sangat penting bagi pengelola program KB, karena program KB saat ini diarahkan pada kemandirian dan peningkatan fungsi sektor swasta.

Gambar 3.5. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Tempat Memperoleh Alat/Cara KB di Provinsi Lampung, 2015

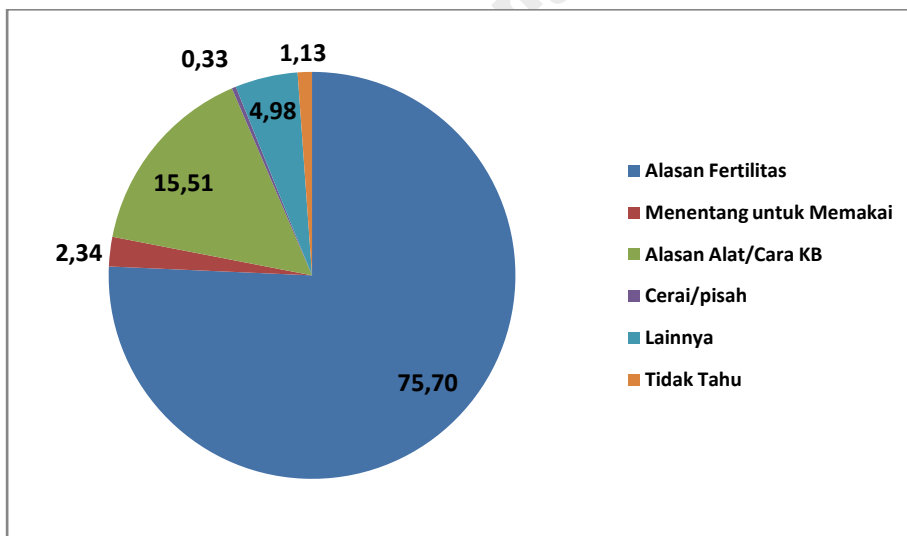


. Hasil SUPAS 2015 menunjukkan pemakai kontrasepsi lebih banyak memanfaatkan jasa pelayanan bidan, baik bidan di desa (42,13 persen) maupun bidan praktek (34,55 persen). Sedangkan pemakai kontrasepsi yang memanfaatkan jasa pelayanan puskesmas hanya 7,4 persen.

3.2.3. Alasan untuk Tidak Memakai KB

Salah satu cara untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerimaan program KB adalah menanyakan kepada bukan peserta KB alasan mereka tidak ingin memakai kontrasepsi. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah yang berkaitan dengan alasan fertilitas (75,7 persen). Alasan yang berkaitan dengan fertilitas mencakup ingin punya anak (49,03 persen), menopause/histerektomi (9,55 persen) dan tidak dapat hamil (5,05 persen). Sekitar 15,51 persen wanita menyebutkan alasan yang terkait dengan alasan alat/cara KB terutama terkait dengan efek samping/masalah kesehatan (10,63 persen).

Gambar 3.6. Persentase Wanita Kawin 15-49 Tahun menurut Alasan Tidak Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Lampung, 2015



Bab IV. Mortalitas dan Kesehatan

4.1. Kematian Bayi dan Balita

Pada kematian terdapat perbedaan mengenai peristiwa-peristiwa kematian yang terjadi di dalam rahim (*intra uterin*) dan diluar rahim (*extra uterin*). Kematian yang terjadi di dalam rahim seorang ibu (*intra uterin*) dapat disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berikut:

1. Abortus, kematian janin menjelang 16 minggu;
2. *Immature*, kematian janin antara umur kandungan diatas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu;
3. *Premature*, kematian janin di dalam kandungan pada umur diatas 28 minggu sampai waktu lahir.

Sedangkan pada kematian bayi di luar rahim (*extra uterin*) dapat dibedakan atas:

1. Lahir mati (*still birth*), kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak terdapat tanda-tanda kehidupan;
2. Kematian baru lahir (*neo natal death*) adalah kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari setahun;
3. Kematian lepas baru lahir (*post neo natal death*) adalah kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun;
4. Kematian bayi (*infant mortality*), kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari satu tahun.
5. Pengukuran Mortalitas

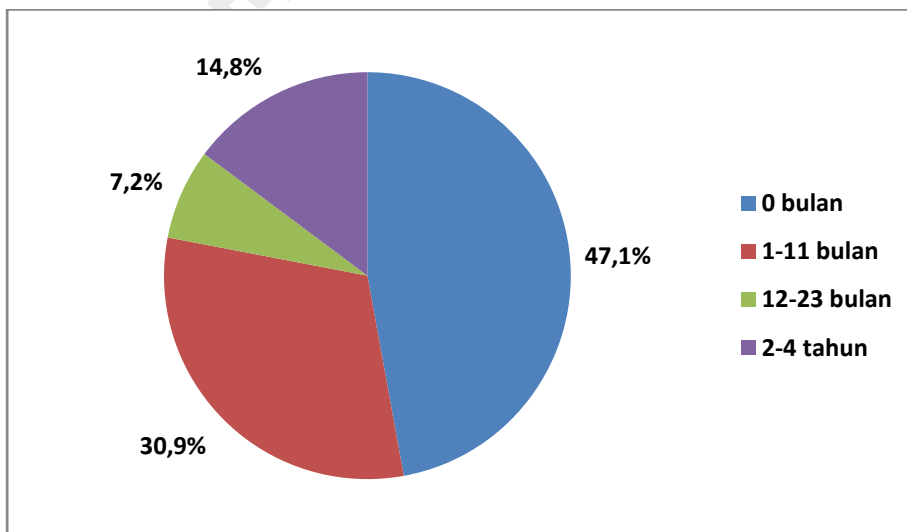
Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin terhadap sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Laporan Depkes RI, 2008 menjelaskan bahwa setiap tahunnya di seluruh dunia 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama.

Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis dan komplikasi berat badan lahir rendah.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, hampir sebanyak satu perdua kejadian kematian bayi terjadi pada bulan pertama usia kehidupannya. Diikuti oleh kejadian kematian *post neo-natal* atau bayi berusia 1-11 bulan mencapai sekitar 30,87 persen. Sedangkan kejadian kematian anak umur 12-23 bulan mencapai 7,19 persen.

Gambar 4.1. Persentase Kejadian Kematian Bayi dan Balita di Provinsi Lampung, 2015



Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa angka kematian bayi dan balita laki-laki lebih tinggi daripada angka kematian bayi dan balita perempuan. Sejalan dengan penelitian, hasil SUPAS 2015 memperlihatkan kejadian kematian bayi dan balita laki-laki di Provinsi Lampung cenderung lebih tinggi dari kejadian kematian perempuan. Sekitar 2 dari 3 bayi dan balita yang meninggal berjenis kelamin laki-laki.

Salah satu penjelasan mengapa lebih banyak kelahiran prematur pada bayi laki-laki karena mereka lebih cenderung memiliki masalah plasenta, pre-eklampsia, dan tekanan darah tinggi. Hal itu berhubungan dengan kelahiran prematur. Bayi laki-laki diduga 2 kali lebih rentan terserang autisme, 6 kali lebih beresiko mengidap gangguan hiperkinesia, lebih cenderung tidak normal/cacat, mayoritas penderita skizofrenia adalah laki-laki. Hal inilah yang cenderung menyebabkan bayi laki-laki rentan kepada kematian dibanding perempuan.

Data hasil penelitian *London School of Hygiene and Tropical Medicine* (LSHTM) tahun 2012 menunjukkan, 34.400 anak laki-laki lahir sebelum usia 37 minggu dalam kandungan, dibandingkan dengan 28.700 perempuan. Penelitian ini memang masih dilakukan di Inggris, namun cukup menunjukkan indikasi kuat. Profesor Lawn seorang neonatologis dan epidemiologis di LSHTM mengatakan, anak laki-laki memiliki kecenderungan biologis untuk dilahirkan secara prematur. Hasil penelitiannya menunjukkan, anak laki-laki memiliki tingkat kematian dan kecacatan yang tinggi akibat lahir terlalu dini. Bayi laki-laki memiliki kemungkinan infeksi, sakit kuning, komplikasi kelahiran, dan kondisi bawaan yang lebih tinggi.

Studi menemukan, tingkat yang lebih tinggi dari kecacatan pada anak laki-laki mempengaruhi masalah kesehatan, termasuk *cerebral palsy* (lumpuh karena otak yang luka), kebutaan dan gangguan penglihatan. Hasil penelitian Gurian (1996) dalam bukunya berjudul *The Wonder of Boys* menjelaskan bahwa angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi sebesar 25 persen dari bayi perempuan. Anak laki-laki memiliki kemungkinan lahir prematur 14 persen lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Ini menurut angka baru yang menunjukkan tambahan 5.700 anak laki-laki secara prematur tiap tahun di Inggris.

4.2. Kematian Ibu

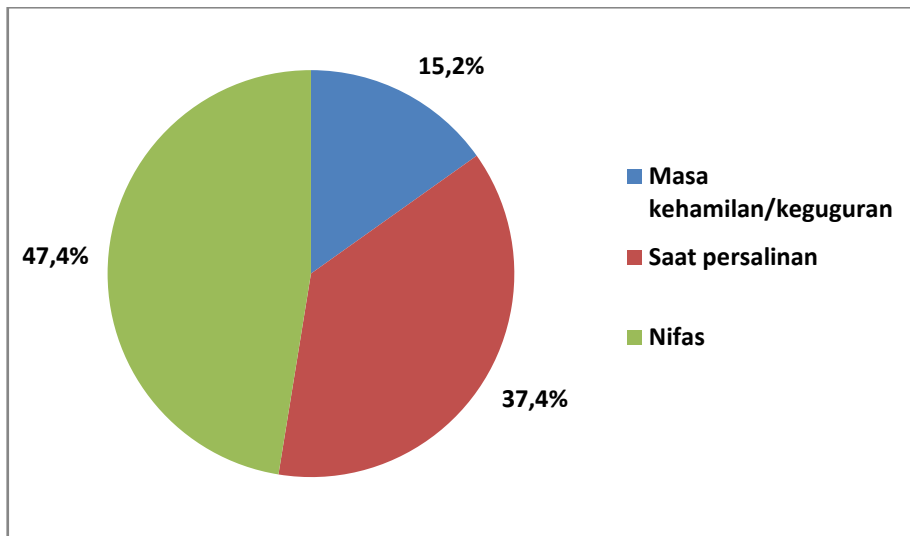
Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kesehatan yang harus diturunkan, tingginya AKI mencermintakan tingginya masalah kesehatan.

Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal yang rendah pula. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun) memberi peran penting terhadap penurunan AKI dan pencapaian program Keluarga Berencana (Andrews, 2009).

Angka kematian ibu atau kematian dalam masa hamil, bersalin dan nifas merupakan salah satu indikator kesehatan wanita usia reproduksi dan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan obstetn. Dari beberapa studi menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia relatif masih tinggi. Berbagai intervensi program kesehatan telah dilakukan namun angka kematian ibu belum tampak kecenderungan penurunan yang berarti. Keadaan ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu sangat kompleks ditinjau dari faktor penyebab maupun faktor risiko.

Berdasarkan hasil SUPAS 2015 Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa sebesar 47,44 persen kematian maternal terjadi pada waktu nifas/dua bulan setelah persalinan atau keguguran, pada waktu masa persalinan sebesar 37,39 persen dan pada waktu masa kehamilan/keguguran sebesar 15,16 persen.

Gambar 4.2. Persentase Kejadian Kematian Ibu menurut Masa Kehamilan



Angka kematian ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi oleh ibu selama kehamilan sampai dengan paska melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Rosmans dan Graham, lokasi terjadinya kematian ibu paling banyak berada di rumah sakit, yaitu sekitar 40-70 persen. Sementara sebesar 20-35 persen kematian

ibu terjadi ketika persalinan di rumah, dan 10-18 persen kematian ibu terjadi ketika persalinan berada diperjalanan.

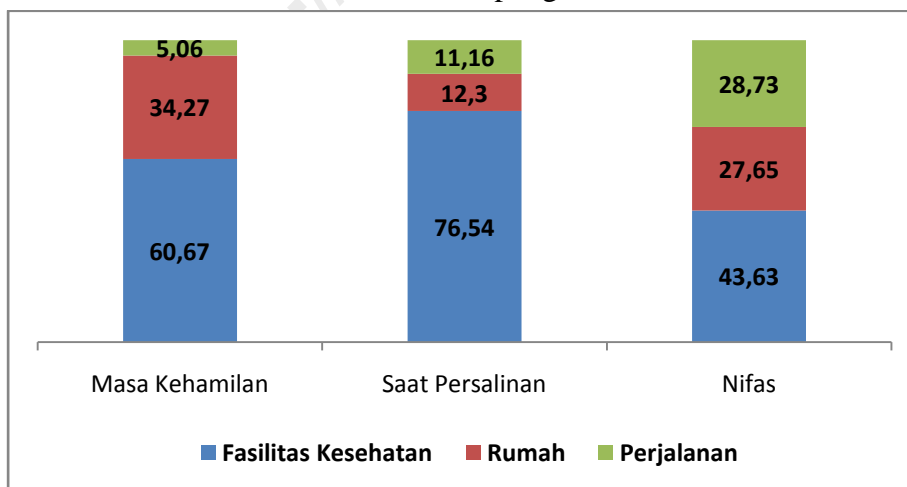
Tabel 4.1. Lokasi Kejadian Kematian Ibu di Berbagai Negara

Negara	Tahun	Jumlah kematian ibu	Rumah sakit	Fasilitas kesehatan lainnya	Rumah	Tempat Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mesir	2000	580	360 (62%)	243	168(29%)	52 (9%) perjalanan
Afrika Selatan	1998	676	621 (92%)	154	16 (2%)	10 (2%) di rumah sakit non pemerintah, 15 (2%) tidak diketahui
Suriname	1991 - 1993	64	58 (83%)	160	9 (14%)	
Vietnam	2000 - 2001	80	32 (40%)		35 (44%)	1 (1%) klinik swasta, 6 (8 %) perjalanan

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2013

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, sebagian besar kejadian kematian pada persalinan terjadi di rumah sakit sebesar 76,54 persen, diikuti di rumah sebesar 12,3 persen. Seperti halnya kejadian kematian pada tahap persalinan, kejadian kematian yang terjadi pada tahap nifas sebagian besar terjadi di fasilitas kesehatan sebesar 43,65 persen.

Gambar 4.3. Lokasi Kejadian Kematian Ibu berdasarkan Masa Kehamilan di Provinsi Lampung, 2015



Melihat fakta bahwa kematian ibu banyak terjadi karena persalinan di rumah sakit, maka dibutuhkan upaya penurunan kematian ibu yang difokuskan di rumah

sakit. Masih tingginya cakupan ibu bersalin di rumah menurut Nolan (2004) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama adalah tingkat pengetahuan meliputi pengertian persalinan di rumah. Kedua, sosial budaya, hal ini terutama dipengaruhi oleh ibunya sendiri dan tempat dimana sang ibu melahirkan anak-anaknya. Jika ibunya melahirkan di rumah dan menikmatinya, wanita tersebut mungkin beranggapan bahwa ia akan bahagia dengan hal yang sama. Ketiga, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam menentukan tempat persalinan. Keempat, tingkat ekonomi, banyak pasangan suami istri yang beranggapan bahwa bersalin di rumah lebih hemat dibanding bersalin di rumah sakit atau rumah bersalin. Kelima, keamanan, bahwa melahirkan di rumah jauh lebih aman dibanding di RS atau rumah bersalin karena mereka beranggapan bayinya tidak mungkin tertukar dan tidak terkena infeksi nosokomial. Akhirnya, jarak dengan tempat pelayan kesehatan.

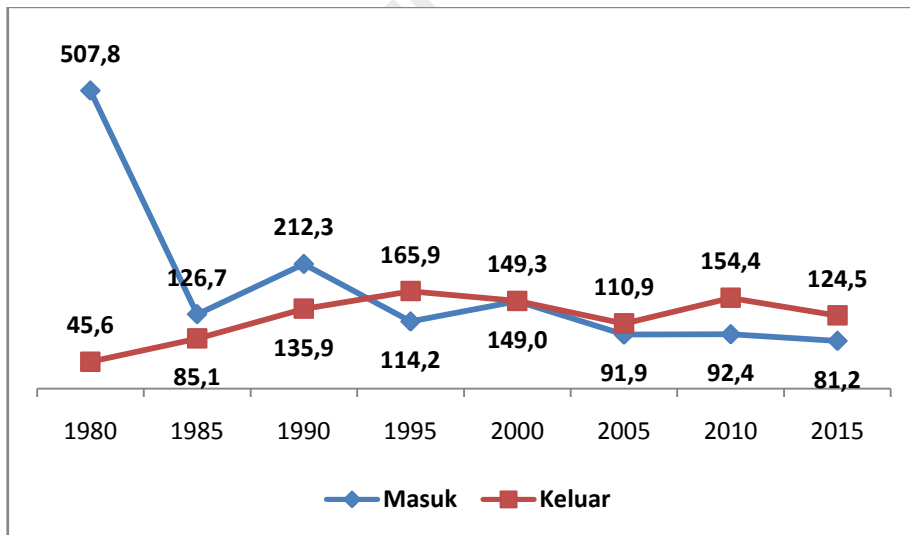
Bab V. Mobilitas Penduduk

5.1. Migrasi Risen

Migrasi risen adalah migrasi menurut tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Seseorang dikatakan melakukan migrasi risen jika tempat tinggalnya yang sekarang berbeda dengan tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu. Migrasi risen yang disajikan untuk batas wilayah provinsi.

Selama dua dekade terakhir tren migrasi di Provinsi Lampung telah mengalami perubahan. Tahun 2010 tercatat jumlah migran yang masuk sebanyak 212,3 ribu jiwa lebih banyak dibanding jumlah migran yang keluar sebanyak 135,9 ribu jiwa. Lima tahun kemudian mulai terjadi perubahan tren migrasi. Jumlah migran yang masuk sebanyak 114,2 ribu jiwa lebih sedikit dibanding jumlah migran yang keluar sebanyak 165,9 ribu jiwa. Tren migrasi neto yang negatif ini terus berlanjut hingga saat ini. Jumlah migran yang masuk hanya 81,2 ribu jiwa sementara jumlah migran yang keluar mencapai 124,5 ribu jiwa.

Gambar 5.1. Tren Migrasi Risen di Provinsi Lampung (Ribu Jiwa), 1980-2015



Motif migran yang masuk ke Provinsi Lampung didominasi karena alasan Ikut suami/istri/orang tua/anak mencapai 56,38 persen. Disusul motif ekonomi alasan pekerjaan dan mencari pekerjaan masing-masing sekitar 22,39 persen dan 6,01 persen. Sementara persentase alasan pindah karena pendidikan, perubahan

status perkawinan, ikut saudara kandung/famili lain dan lainnya kurang dari 5 persen.

Tabel 5.1. Alasan Pindah Migran yang Masuk ke Provinsi Lampung, 2015

Alasan Pindah	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerjaan	31,55	13,89	22,39
Mencari pekerjaan	9,66	2,62	6,01
Pendidikan	2,79	4,96	3,92
Perubahan status perkawinan	2,21	4,35	3,32
Ikut suami/istri/orang tua/anak	45,16	66,79	56,38
Ikut saudara kandung/famili lain	3,37	4,01	3,70
Lainnya	5,27	3,38	4,29
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah Absolut	39.085	42.115	81.200

5.1.1. Volume dan Arah Migrasi

Persentase migran dari Lampung ke berbagai provinsi di Pulau Jawa mencapai 54,9 persen. DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat menjadi provinsi yang banyak dituju migran dari Lampung. Persentase migran dari Lampung di ketiga provinsi ini berturut-turut 16,49 persen, 12,27 persen dan 11,23 persen. Sedangkan persentase migran dari Lampung ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur kurang dari 7 persen. Keberadaan ferry bakauheni-merak dan pesawat terbang yang bertarif murah (*low cost carriers*) semakin memperlancar transportasi migran dari Lampung ke Pulau Jawa.

Di luar Pulau Jawa, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang banyak dituju migran dari Lampung. Persentase migran dari Lampung ke provinsi ini sekitar 12,27 persen. Tingginya persentase migran dari Lampung ke provinsi ini disebabkan jarak yang relatif dekat didukung sarana transportasi yang lancar. Sementara persentase migran dari Lampung ke berbagai provinsi lainnya di Pulau Sumatera kurang dari 6 persen.

Aliran migran keluar dari Lampung yang tinggi ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Sumatera Selatan diikuti aliran masuk dari provinsi tersebut ke Lampung. SUPAS 2015 memotret jumlah migran yang paling banyak masuk ke Lampung dari Sumatera Selatan sebanyak 13,64 ribu jiwa. Sementara migran yang

masuk ke Lampung dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten berturut-turut 15,47 ribu jiwa, 12,52 ribu jiwa dan 9,26 ribu jiwa. Di sisi lain, volume migran dari Jawa Tengah yang masuk ke Lampung relatif tinggi mencapai 8,03 ribu jiwa. Tingginya volume migran dari provinsi tersebut terkait kecenderungan migran memilih daerah yang telah terdapat teman atau sanak saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.³ Mereka memberikan informasi yang positif dari daerah tujuan sehingga mendorong minat penduduk untuk bermigrasi.

Tabel 5.2. Volume dan Arah Migrasi Risen menurut Daerah Asal/Tujuan di Provinsi Lampung, 2015

Daerah Asal/Tujuan	Migrasi Masuk		Migrasi Keluar	
	Jiwa	Persen	Jiwa	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	12.523	15,42	20.530	16,49
Jawa Barat	15.474	19,06	13.982	11,23
Jawa Tengah	8.027	9,89	7.917	6,36
DI Yogyakarta	663	0,82	5.355	4,30
Jawa Timur	6.031	7,43	5.281	4,24
Banten	9.267	11,41	15.273	12,27
Sumatera Selatan	13.635	16,79	17.830	14,32
Sumatera (kecuali Sumsel)	9.299	11,45	31.889	25,62
Bali, NTB dan NTT	627	0,77	1.434	1,15
Kalimantan	563	0,69	2.371	1,90
Sulawesi	528	0,65	1.485	1,19
Maluku dan Papua	258	0,32	1.131	0,91
Luar Negeri	4.305	5,30	-	-
Total	81.200	100,00	124.478	100,00

5.1.2. Persebaran Penduduk Migran

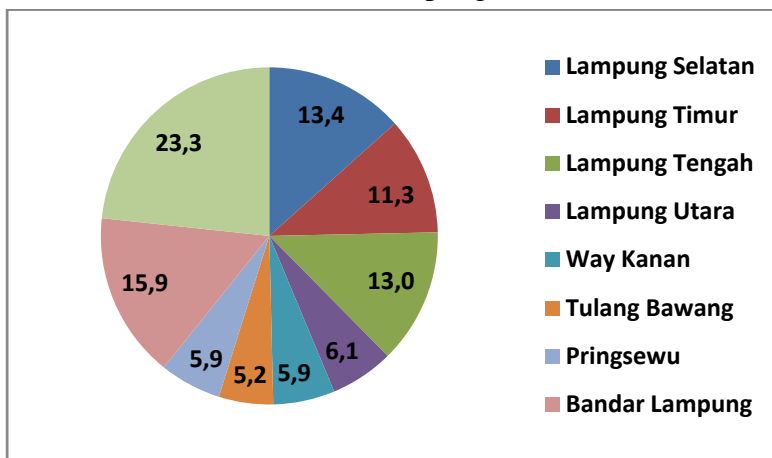
Migran yang masuk ke Lampung menyebar ke kabupaten dan kota. Persentase migran yang paling tinggi bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung sekitar 15,91 persen. Sebab mempunyai faktor positif yang memberi nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di kota tersebut antara lain terdapat sekolah/universitas, rumah sakit, pabrik, pusat perbelanjaan/*mall*, hotel, bank dan

³ Titik awal dari persebaran suku Jawa ke pulau-pulau lain adalah dilaksanakannya program kolonisasi yaitu pemindahan 155 keluarga dari daerah Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Lampung, pada bulan November 1905.

Sensus terakhir (SP2010) mencatat jumlah suku Jawa di Provinsi Lampung telah mencapai 4.855,01 ribu jiwa atau sekitar 63,98 persen.

lain-lain fasilitas pendukung kegiatan ekonomi.⁴ Sedangkan persentase migran yang terendah terdapat di Kabupaten Mesuji sekitar 2,29 persen.

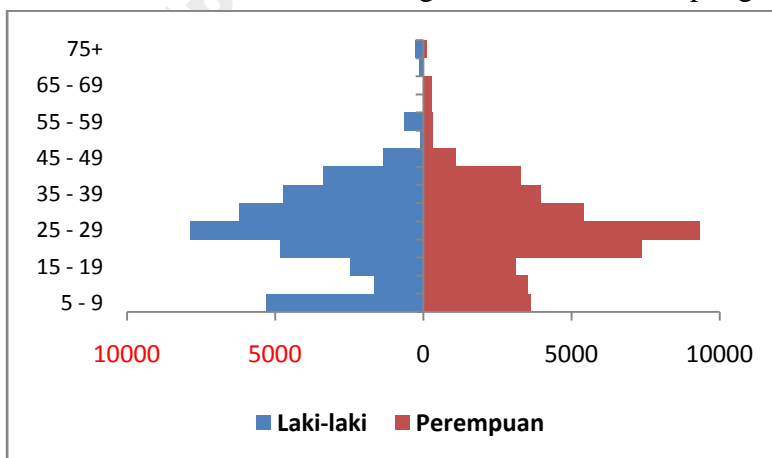
Gambar 5.2. Persebaran Penduduk Migran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015



5.1.3. Struktur Umur Penduduk Migran

Jumlah migran laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk migran sekitar 92,81 persen. Umur muda masih merupakan ciri dari migran, yaitu konsentrasi terletak pada 20-39 tahun. Semakin lancarnya fasilitas transportasi mendorong pemuda meninggalkan daerahnya berusaha mengadu nasib ke daerah lain.

Gambar 5.3. Piramida Penduduk Migran di Provinsi Lampung, 2015



⁴ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung. Tahun 2015 yang lalu nilai PDRB mencapai 39,17 triliun rupiah.

5.1.4. Status Perkawinan dan Tingkat Pendidikan Penduduk Migran

Jumlah penduduk migran yang berumur 10 tahun ke atas sebanyak 72,28 ribu jiwa. Sebagian besar migran berstatus kawin baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 66,03 persen dan 74,17 persen. Tingginya persentase migran berstatus kawin disebabkan mereka yang pindah umumnya mereka yang telah berumah tangga. Sekitar 25,82 persen migran berstatus belum kawin dan sisanya berstatus cerai hidup atau cerai mati. Persentase migran laki-laki yang belum kawin lebih tinggi dibanding persentase migran perempuan yang belum kawin.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Migran Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Provinsi Lampung, 2015

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum kawin	31,10	21,18	25,82
Kawin	66,03	74,17	70,36
Cerai hidup	2,66	2,26	2,44
Cerai mati	0,22	2,39	1,38
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah Absolut	33.781	38.504	72.285

Tingkat pendidikan penduduk migran relatif lebih tinggi dibanding penduduk non migran. Untuk non migran hanya 4,85 persen berpendidikan diploma ke atas, sedangkan untuk migran sekitar 11,37 persen. Tingginya pendidikan mempunyai korelasi positif dengan mobilitas penduduk. Sebab pendidikan menimbulkan motivasi penduduk untuk pergi ke daerah lain.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Migran Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015

Tingkat Pendidikan	Non Migran			Migran		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak tamat SD [*])	20,70	24,19	22,40	8,87	11,87	10,47
SD/MI/ sederajat	28,91	28,69	28,80	19,58	23,72	21,79
SMP/MTs/ sederajat	23,89	23,09	23,50	27,92	27,78	27,85
SMA/MA/ sederajat	22,11	18,69	20,45	31,35	26,05	28,53
Perguruan Tinggi ^{**})	4,39	5,33	4,85	12,28	10,57	11,37
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Absolut	3.328.421	3.151.313	6.479.734	33.781	38.504	72.285

*) Termasuk tidak/belum pernah bersekolah.

**) Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, S2 dan S3.

5.1.5. Ketenagakerjaan Penduduk Migran

Jumlah penduduk migran yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 42,06 ribu jiwa. Migran yang bekerja paling banyak bekerja di sektor pertanian. Persentase migran yang bekerja di sektor ini mencapai 39,67 persen. Sektor ekonomi lainnya yang banyak menyerap pekerja migran adalah perdagangan dan jasa lainnya. Kedua sektor ini mampu menyerap pekerja migran berturut-turut 6,64 ribu pekerja dan 3,76 ribu pekerja.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Migran Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2015

Lapangan Usaha (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	44,35	29,51	39,67
Industri Pengolahan	5,30	1,87	4,22
Konstruksi	6,51	0,22	4,53
Perdagangan Besar & Eceran; dan Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	11,05	26,05	15,79
Transportasi & Pergudangan	5,94	0,01	4,07
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,40	7,69	3,38
Informasi & Komunikasi	3,17	4,42	3,56
Jasa Pendidikan	3,84	7,96	5,14
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,71	9,39	3,45
Jasa Lainnya	7,25	12,58	8,93
Lainnya ^{*)}	10,48	0,30	7,27
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah Absolut	28.787	13.272	42.059

^{*)} Pertambangan & Penggalian; Pengadaan Listrik & Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang; Jasa Keuangan & Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

Ditinjau dari status pekerjaan, pekerja migran paling banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 15,22 ribu pekerja atau sekitar 36,19 persen. Perbedaan yang paling mencolok antara laki-laki dan perempuan terlihat pada status pekerjaan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk Migran Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Provinsi Lampung, 2015

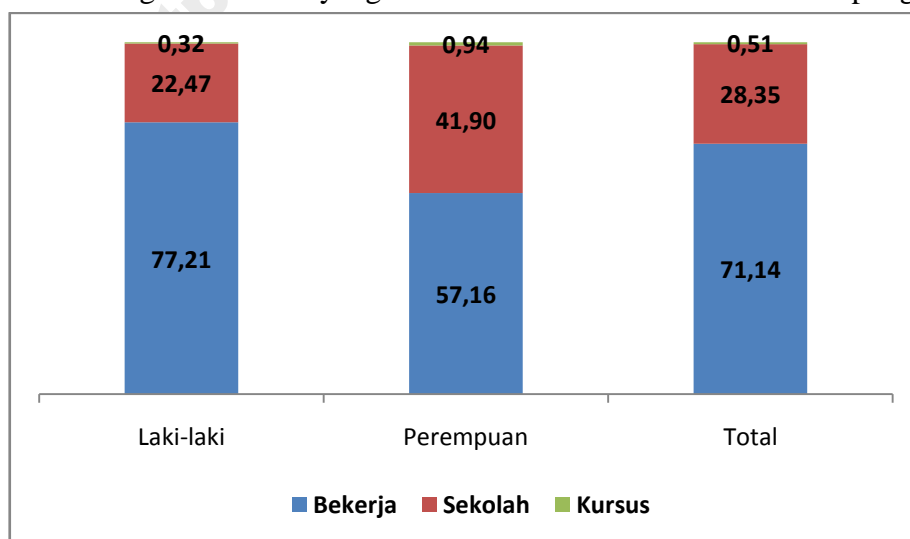
Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	22,71	21,15	22,22
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	11,70	5,73	9,81
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	6,33	0,00	4,33
Buruh/karyawan/pegawai	37,38	33,60	36,19
Pekerja bebas	15,26	12,12	14,27
Pekerja keluarga/tidak dibayar	6,62	27,39	13,18
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah Absolut	28.787	13.272	42.059

Persentase pekerja migran perempuan 27,39 persen jauh lebih tinggi dibanding pekerja migran laki-laki 6,62 persen. Kondisi ini diduga berkorelasi dengan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

5.2. Komuter

Komuter adalah penduduk yang secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas administratif tingkat kabupaten/kota.

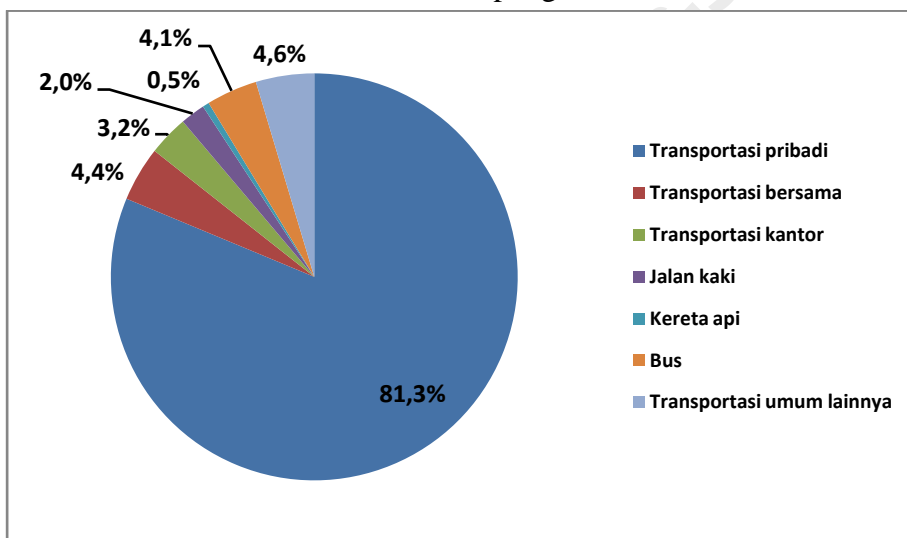
Gambar 5.4. Kegiatan Utama yang dilakukan Komuter di Provinsi Lampung, 2015



Tahun 2015 tercatat jumlah komuter sebanyak 126,46 ribu jiwa dimana laki-laki sebanyak 88,14 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 38,32 ribu jiwa. Mereka melakukan komuter dengan tujuan bekerja (71,14 persen), sekolah (28,35 persen) dan kursus (0,51 persen). Ditinjau dari jenis kelamin terlihat bahwa persentase pekerja komuter laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja komuter perempuan.

Jenis transportasi yang paling banyak digunakan komuter ke tempat kegiatan adalah transportasi pribadi. Sekitar 81,3 persen komuter menggunakan jenis transportasi ini. Sisanya menggunakan transportasi umum (9,22 persen), transportasi bersama (4,4 persen), transportasi kantor (3,2 persen), transportasi bus (4,6 persen) dan jalan kaki (2,0 persen). Jenis transportasi umum yang paling banyak digunakan komuter ke tempat kegiatan adalah bus.

Gambar 5.5. Transportasi Utama yang Biasa digunakan Komuter di Provinsi Lampung, 2015



Bab VI. Kesulitan Fungsional

6.1. Potret Disabilitas

Ada sekitar 650 juta orang menyandang disabilitas, dan sedikitnya 80 persen berada di negara berkembang (ILO, 2009). Banyak diantara penyandang disabilitas adalah anak-anak, menurut sebuah perkiraan yang banyak digunakan, sekitar 93 juta anak – atau 1 dari 20 anak usia 14 tahun atau kurang hidup dalam disabilitas yang sedang atau parah (UNICEF, 2013). Mengutip ungkapan Anthony Lake, Direktur eksekutif UNICEF “... di suatu tempat, seorang anak diberi tahu bahwa ia tidak bisa bermain karena ia tidak bisa berjalan, atau bahwa ia tidak bisa belajar karena tidak bisa melihat. Anak itu patut mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dan kita semua memperoleh manfaat ketika anak itu, dan semua anak, bisa membaca, belajar, dan memberikan kontribusinya. Jalannya akan sangat menantang. Tapi anak-anak tidak menerima pembatasan yang tidak perlu. Kita juga tidak”.

Setiap warga Negara Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama. Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tanggal 13 Desember 2006 pasal 25 dikatakan penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Indonesia

telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat mengenai Penyandang Cacat pada Bagian Ketiga yaitu pasal 139-140.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, dimana penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologis, fisiologis maupun struktur atau fungsi anatomis. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan kondisi penyandang disabilitas dalam perspektif kesehatan untuk memahami dan mengukur kebutuhan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan. Namun, kesehatan bukanlah satu bidang yang dapat berdiri sendiri. Derajat dan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya serta pelayanan dan penyediaan fasilitas sektor lain.

Data terbaru tentang disabilitas kembali dikumpulkan oleh BPS melalui SUPAS 2015. Informasi mengenai disabilitas ditanyakan kepada anggota rumah tangga berumur dua tahun ke atas. Identifikasi disabilitas pada balita harus dengan membandingkan antara kesesuaian kemampuan anak dan periode tumbuh kembangnya atau dengan membandingkan aktivitas balita tersebut dengan balita seusianya. Jadi ukuran ada tidaknya gangguan dan sedikit atau parahnya adalah

relatif terhadap keadaan normal. Berikut ini adalah persentase penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami kesulitan fungsional.

Tabel 6.1. Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas menurut Jenis dan Tingkat Kesulitan Disabilitas di Provinsi Lampung, 2015

Jenis Disabilitas	Tingkat Kesulitan			Total gangguan
	Sama Sekali Tidak Bisa	Banyak Kesulitan	Sedikit Kesulitan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gangguan Penglihatan	10 347	49 230	32 3404	382 981
Gangguan Pendengaran	5 756	34 229	17 5062	215 047
Gangguan Berjalan/Naik Tangga	33 920	27 135	19 9394	260 449
Gangguan Menggerakkan Tangan/Jari	4 731	15 626	6 3577	83 934
Gangguan Mengingat/Konsentrasi	16 343	27 705	12 1082	165 130
Gangguan Perilaku/Emosional	9 344	14 038	5 4880	78 262
Gangguan Bicara/Komunikasi	11 118	20 236	6 9112	100 466
Gangguan Mengurus Diri Sendiri	16 315	12 020	3 6253	64 588

Berdasarkan hasil SUPAS 2015 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8.109.801 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 7.835.565 jiwa berusia 2 tahun ke atas. Berdasarkan 8 jenis disabilitas yang ditanyakan, gangguan penglihatan merupakan disabilitas yang paling banyak dialami penduduk yaitu sebesar 382 981 kejadian. Diikuti gangguan berjalan/naik tangga sebesar 260.449 kejadian. Gangguan pendengaran menempati posisi ketiga sebesar 215.049 kejadian. Sebaliknya gangguan mengurus diri menempati posisi terakhir sebesar 64.558 kejadian dari total gangguan yang dialami penduduk 2 tahun keatas. Gangguan tidak dapat sama sekali dan parah terbanyak terjadi pada berjalan naik tangga, diikuti gangguan pada penglihatan. Setiap penduduk dapat mengalami kejadian disabilitas/gangguan lebih dari 1 (satu).

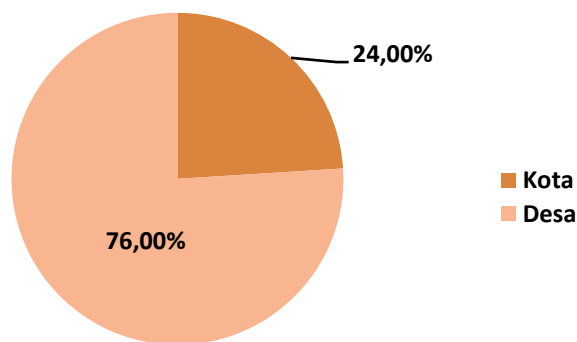
Daerah pedesaan mendominasi jumlah disabilitas

BPS memperlihatkan angka kemiskinan pada September 2015 mencapai 28,5 juta jiwa, terdiri atas penduduk desa 17,9 juta dan penduduk kota 10,6 juta. Indeks

keparahan kemiskinan naik tipis pada Maret 2016 senilai 0,52 dibanding September 2015 sebesar 0,51. Sebuah kajian *World Bank* tahun 2005, yang menggunakan survei rumah tangga untuk meneliti hubungan antara disabilitas dengan status ekonomi rumah tangga, mendapatkan bahwa bahwa insiden disabilitas tampaknya lebih tinggi di kelompok paling miskin dalam suatu populasi penduduk.

Demikian cukup beralasan bahwa penduduk di desa memiliki tingkat disabilitas lebih tinggi dari penduduk daerah perkotaan. Berdasarkan klasifikasi desa/kota hasil SUPAS 2015, penduduk perdesaan yang mengalami disabilitas lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan yaitu sebesar 456.086 jiwa (76 persen dari total penduduk penyandang disabilitas).

Gambar 6.1. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015



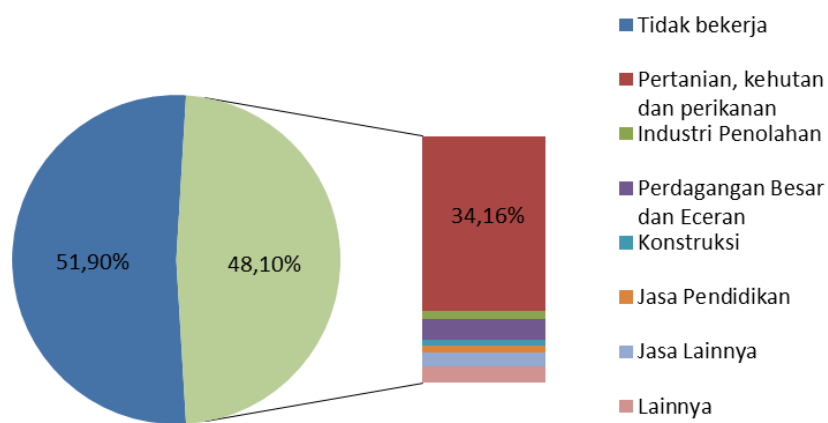
Sebagian besar penyandang disabilitas tidak bekerja.

"Sesuai UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah ditegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Pada pasal 6 menyatakan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh "pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya". Sedangkan pasal 14 mewajibkan perusahaan swasta dan pemerintah untuk mempekerjakan penyandang cacat.

Pengamatan yang sama dilakukan oleh Sudibyo Markus (2002) yang melakukan evaluasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja bagi

ILO. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah mempunyai instrumen hukumnya tetapi implementasinya sangat lemah. Dalam laporan Markus Sudibyo untuk ILO (2002) disebutkan bahwa menurut Susenas 2000, 17 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor pertanian, 18,6 persen di sektor industri, 23,9 persen di sektor perdagangan (*general trading*), dan 13 persen di sektor lainnya.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung, 2015



Berdasarkan hasil SUPAS 2015, sebanyak 51 persen penduduk disabilitas tidak bekerja yaitu sebesar 311.477 jiwa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marjuki (2010), berdasarkan hasil survei ICF di 14 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tidak bekerja yaitu sebesar 51,9 persen. Sedangkan penyandang disabilitas yang bekerja umumnya bekerja pada sektor pertanian sebesar (34,16) persen. Perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua.

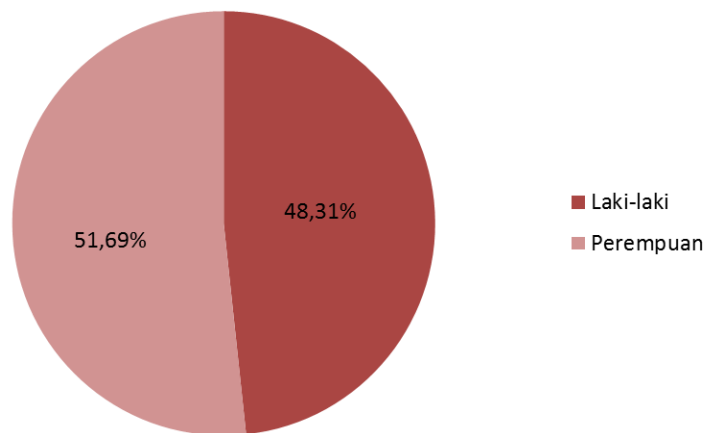
Perempuan masih mendominasi disabilitas

Di Eropa satu dari 8 orang penduduk bekerja dilaporkan memiliki disabilitas. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Depkes, 2007 dan 2013) menunjukkan bahwa sekitar 11-14 persen penduduk Indonesia (24-30 juta) mengalami disabilitas. Prevalensi perempuan yang mengalami disabilitas lebih besar (12,57 persen)

dibanding laki-laki (9,4 persen). Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Semakin tua seseorang, semakin rentan terhadap kondisi disabilitas (Laki-laki dengan usia lebih 70 tahun sebesar 34,8%; Sedangkan penduduk perempuan diatas usia 70 tahun sebesar 40,1%.

Penyandang disabilitas (minimal memiliki satu gangguan/kesulitan) di Provinsi Lampung sebanyak 600.126 jiwa (7,66 persen) yang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 310.213 atau sebesar 51,69 persen terhadap penduduk Lampung menyandang disabilitas.

Gambar 6.3. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2015



Stigma dan diskriminasi penyandang disabilitas perempuan menjadi berlapis karena terkait dengan kondisi dan posisinya di masyarakat. Pengalaman dan dampak yang berbeda yang dialami oleh perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat. Pembagian kerja yang tidak adil dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, telah menyebabkan akses dan kontrol, manfaat dan kesempatan yang didapatkan perempuan penyandang disabilitas tidak setara dengan penyandang disabilitas pada umumnya.

Di dalam keluarga, penyandang disabilitas perempuan seringkali kurang mendapatkan perhatian dan bantuan dari anggota keluarga, atau kurang diprioritaskan untuk bisa mengakses kemandirian. Misalnya, penyandang disabilitas perempuan banyak yang merasa minder untuk keluar rumah, atau

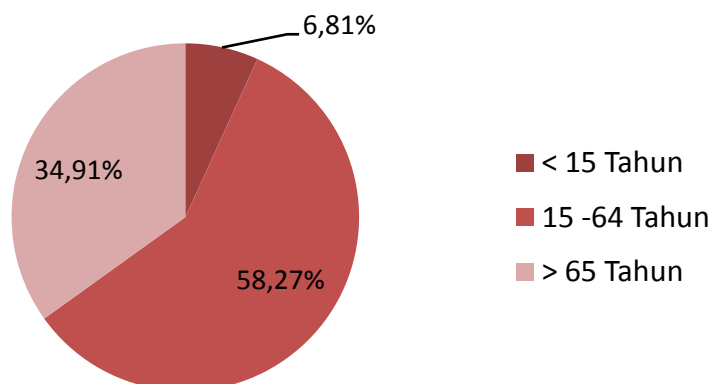
merasa tidak mungkin mendapat pasangan hidup/suami yang “normal” atau bukan penyandang disabilitas. Mereka takut tidak dapat melayani suaminya. Oleh karena itu ada anggapan bahwa sudah bersyukur kalau bisa dapat suami yang penyandang disabilitas juga. Di dalam keluarga dengan anak penyandang disabilitas, ibu memainkan peranan penting dalam merawat dan menanggung beban anaknya, seperti peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap perempuan.

Kelompok umur produktif mendominasi disabilitas

WHO dan Bank Dunia memperkirakan jumlah anak usia 0-14 tahun dengan tingkat disabilitas “sedang” atau “berat” mencapai 93 juta jiwa, dimana 13 juta anak diantaranya, menyandang disabilitas berat. Di seluruh penjuru Eropa, persentase populasi yang dilaporkan memiliki disabilitas adalah yang terbesar pada usia 55–64 (26 persen) delapan kali lebih tinggi dari usia 15–24 (3 persen) (Jones, 2016).

Berdasarkan hasil SUPAS 2015 di Provinsi Lampung. Kelompok usia 15 – 64 tahun yang merupakan kelompok usia produktif mendominasi penyandang disabilitas (minimal satu jenis kesulitan atau gangguan) yaitu hampir mencapai 60 persen, diikuti oleh usia diatas 65 tahun sebesar 34,91 persen.

Gambar 6.4. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015



Rendahnya partisipasi bersekolah bagi penyandang disabilitas

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental

diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Namun, meskipun pemerintah sudah mengupayakan pendidikan yang inklusif, tingkat partisipasi sekolah dasar dari anak-anak penyandang disabilitas masih sekitar 60 persen lebih rendah dibanding dengan anak-anak tanpa disabilitas”.

Menurut (ILO,2011) disabilitas merupakan faktor kuat yang menghalangi anak untuk dapat mengikuti pendidikan. stigma dan ketidaktahuan masyarakat sering mendorong orang tua untuk mengurung anak penyandang disabilitas di rumah. *Under estimate* terhadap anak penyandang cacat menjadi alasan banyak Orang tua yang menolak anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai hingga akhirnya anak-anak tersebut dibiarkan terkunci di rumah.

Demikian jika sumber daya suatu rumah tangga itu terbatas, akhirnya menjadi pilihan bagi dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak bukan penyandang disabilitas, berlandaskan keyakinan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk dapat membantu saudara mereka yang memiliki disabilitas di masa depan. Akibatnya, anak-anak penyandang disabilitas cenderung memperoleh pendidikan yang relatif lebih sedikit.

UNESCO memperkirakan bahwa sepertiga dari 75 juta anak di seluruh dunia yang tidak bersekolah adalah penyandang disabilitas. Kemungkinan seorang anak usia 6-11 tahun dengan disabilitas untuk bersekolah hanyalah setengah dari anak tanpa disabilitas. Hasil survei dengan ICF di 14 propinsi yang dilakukan Kemensos menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari penyandang disabilitas tidak sekolah. Bagi yang bersekolah 75 persen berpendidikan setingkat SD. Selanjutnya dibandingkan dengan hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa kelompok usia 16-18 tahun memiliki angka putus sekolah dan tidak pernah sekolah yang mencapai lebih dari 60 persen. Diikuti oleh kelompok anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan bersekolah lagi sebesar 25 persen.

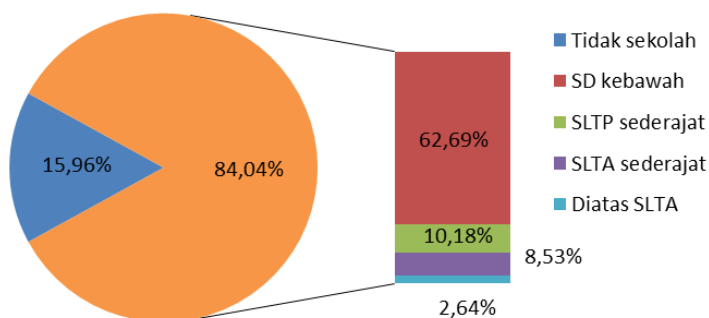
Tabel 6.2. Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Bersekolah di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Umur	Status bersekolah			Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih Sekolah	Tidak bersekolah lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 - 12 tahun	1 512	11 068	1 451	14 031
	10,78 %	78,88 %	10,34 %	100 %
13 - 15 tahun	1 406	6 090	781	8 277
	16,99 %	73,58 %	9,44 %	100 %
16 - 18 tahun	958	2 804	3 041	6 803
	14,08 %	41,22 %	44,70 %	100 %

Tingkat pendidikan penyandang disabilitas di atas 15 tahun

Berdasarkan SUPAS 2015, tingkat pendidikan penyandang disabilitas usia 15 tahun ke atas sebesar 15,96 persen tidak bersekolah sedangkan sebesar 62,69 persen adalah berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan 10,18 persen berpendidikan setingkat SLTP.

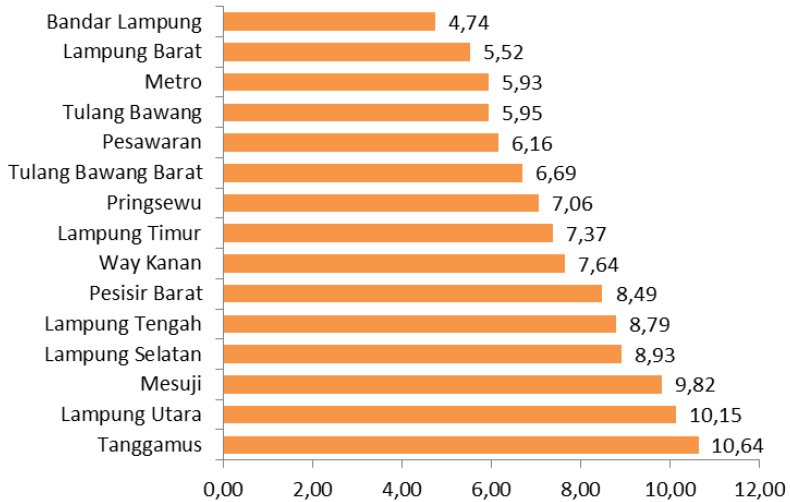
Gambar 6.5. Persentase Penyandang Disabilitas Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Lampung, 2015



Perbandingan penyandang disabilitas di kabupaten/kota

Kabupaten Tanggamus memiliki persentase penyandang cacat tertinggi sebesar 10,64 persen, diikuti oleh Lampung Utara sebesar 10,15 persen, Mesuji menempati posisi ketiga dengan angka sebesar 9,82 persen. Sebaliknya Bandar Lampung memiliki proporsi disabilitas terendah sebesar 4,74 persen.

Gambar 6.6. Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas yang mengalami Disabilitas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015



6.2. Distribusi Disabilitas

6.2.1. Gangguan Penglihatan

Penyandang gangguan penglihatan adalah seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali.

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Penglihatan menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Usia	Tidak sama sekali	Banyak kesulitan	Sedikit kesulitan	Total	Persentase terhadap Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 - 4 Tahun	32	523	0	555	0,01
5 - 14 Tahun	973	661	721	2 355	0,03
15 - 24 Tahun	682	1 906	3 065	5 653	0,07
25 - 44 Tahun	2 767	2 496	36 214	41 477	0,54
45 - 64 Tahun	1 923	10 354	158 205	170 482	2,22
> 65 Tahun	3 743	33 177	124 764	161 684	2,10
Total	10 120	49 117	322 969	382 206	4,97

. Seseorang dikategorikan mengalami disabilitas penglihatan jika masih mengalami kesulitan penglihatan walaupun memakai kacamata/lensa kontak. Termasuk gangguan penglihatan adalah buta total, kurang penglihatan (*low vision*) dan buta warna.

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Provinsi Lampung adalah penyandang gangguan penglihatan. Persentase penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan penglihatan sebesar 4,97 persen. Proporsi terbesar pada usia 45-64 tahun yaitu sebesar 2,22 persen. Dari Tabel 6.3 terlihat bahwa semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami gangguan penglihatan.

Pada Tabel 6.4 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan penglihatan yaitu 197.032 jiwa lebih banyak dibanding penduduk berjenis kelamin laki-laki (185.174 jiwa) di seluruh Provinsi Lampung. Kabupaten dengan gangguan penglihatan terbanyak adalah Lampung Tengah, diikuti Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Penglihatan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Sama sekali Tidak bisa		Banyak kesulitan		Sedikit		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	92	11	335	738	2852	4207	3279	4956
Tanggamus	822	420	2777	3113	17176	18644	20775	22177
Lampung Selatan	858	413	3677	3556	22475	22277	27010	26246
Lampung Timur	998	78	2915	2004	19267	20921	23180	23003
Lampung Tengah	1037	1524	3719	4078	25813	28976	30569	34578
Lampung Utara	352	318	1690	4051	17463	17501	19505	21870
Way Kanan	149	124	981	1190	9115	8266	10245	9580
Tulang Bawang	0	218	558	1346	6588	5689	7146	7253
Pesawaran	212	336	941	1217	6148	6346	7301	7899
Pringsewu	102	164	1100	1828	6291	8143	7493	10135
Mesuji	447	231	771	943	7160	5386	8378	6560
Tulang Bawang Barat	148	126	534	947	4214	4535	4896	5608
Pesisir Barat	87	24	296	584	4086	3628	4469	4236
Bandar Lampung	186	423	1584	1357	6951	8842	8721	10622
Metro	204	16	133	154	1870	2139	2207	2309
Lampung	5694	4426	22011	27106	157469	165500	185174	197032

6.2.2. Gangguan Pendengaran

Seseorang dikategorikan mengalami gangguan pendengaran jika mengalami kesulitan mendengar, meskipun sudah memakai alat bantu dengar. Jumlah penyandang gangguan pendengaran pada penduduk usia 2 tahun ke atas adalah sebanyak 214.338 jiwa dengan rincian tidak dapat mendengar sama sekali

sebanyak 5.202 jiwa, mengalami gangguan berat sebanyak 34.229 jiwa dan mengalami sedikit gangguan pendengaran sebanyak 174.907 jiwa. Kondisi dalam gangguan pendengaran sama halnya dengan gangguan penglihatan, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami gangguan. Faktor usia menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan derajat kesehatannya, oleh karena itu penduduk lanjut usia memiliki resiko yang lebih tinggi dalam hal gangguan fungsi tubuh termasuk pendengaran salah satunya.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Pendengaran menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Usia	Tidak sama sekali	Banyak kesulitan	Sedikit kesulitan	Total	Persentase terhadap Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 - 4 Tahun	0	140	10	150	0,00
5 - 14 Tahun	410	684	804	1 898	0,02
15 - 24 Tahun	1 101	213	1 305	2 619	0,03
25 - 44 Tahun	1 289	1 579	9 019	11 887	0,15
45 - 64 Tahun	1 282	5 643	62 167	69 092	0,90
> 65 Tahun	1 120	25 970	101 602	128 692	1,68
Total	5 202	34 229	174 907	214 338	2,79

Tabel 6.6. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Pendengaran menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Gangguan Pendengaran							
	Sama sekali Tidak bisa		Banyak kesulitan		Sedikit		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	7	297	334	210	1550	4470	1891	4977
Tanggamus	141	456	1481	1127	9860	14228	11482	15811
Lampung Selatan	96	319	2477	1832	9072	12954	11645	15105
Lampung Timur	251	721	2725	2597	10187	12237	13163	15555
Lampung Tengah	497	167	2868	3110	12494	19494	15859	22771
Lampung Utara	398	29	1509	1281	5492	8969	7399	10279
Way Kanan	160	132	662	1112	4535	4101	5357	5345
Tulang Bawang	144	117	433	523	3410	3823	3987	4463
Pesawaran	98	0	332	785	3448	3676	3878	4461
Pringsewu	305	0	1299	1255	2440	5304	4044	6559
Mesuji	85	0	797	455	2974	2442	3856	2897
Tulang Bawang Barat	9	0	520	672	1965	2497	2494	3169
Pesisir Barat	128	132	452	312	1380	1559	1960	2003
Bandar Lampung	154	295	945	1602	4103	5249	5202	7146
Metro	20	44	210	312	470	524	700	880
Lampung	2493	2709	17044	17185	73380	101527	92917	121421

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan pendengaran lebih banyak dialami oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan (121.421 jiwa) dibanding laki-laki (92.917 jiwa). Kabupaten/kota yang relatif banyak mempunyai penyandang gangguan pendengaran adalah Kabupaten Lampung Tengah (38.630 jiwa), Lampung Timur (28.718 jiwa) dan Tanggamus sebesar 27.293 jiwa.

6.2.3. Gangguan Berjalan/Naik Tangga

Seseorang dikatakan mengalami gangguan berjalan atau naik tangga bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami gangguan atau kesulitan. Pada gangguan ini, tingkat keparahan dibedakan menjadi 4 tingkat yaitu sepenuhnya butuh bantuan orang lain, memakai alat bantu dan membutuhkan bantuan orang lain, memakai alat bantu dan tidak memakai alat bantu. Untuk keseragaman analisis, maka dua jawaban yaitu memakai alat bantu dan membutuhkan bantuan orang lain serta memakai alat bantu dimasukkan dalam tingkat gangguan parah.

Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga merupakan jenis disabilitas terbesar nomor 2 setelah gangguan penglihatan. Sebanyak 255.499 jiwa penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan berjalan atau naik tangga dipisahkan menjadi 3 kelompok menurut tingkat keparahan, yaitu sepenuhnya butuh bantuan orang lain (32.157 jiwa), mengalami gangguan parah (26.664 jiwa) dan mengalami sedikit gangguan sebanyak 196.978 jiwa. Seperti jenis gangguan sebelumnya yaitu penglihatan dan pendengaran, semakin tua usia semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan struktur fisik dan tulang seseorang terutama pada usia lanjut.

Tabel 6.7. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Berjalan/Naik Tangga menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Usia	Butuh Bantuan	Banyak kesulitan	Sedikit kesulitan	Total	Persentase terhadap Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 - 4 Tahun	1 297	120	4 157	5 574	0,07
5 - 14 Tahun	1 468	815	13 701	15 984	0,21
15 - 24 Tahun	1 715	80	11 645	13 440	0,17
25 - 44 Tahun	2 333	1 709	31 323	35 365	0,46
45 - 64 Tahun	6 499	4 758	63 529	74 786	0,97
> 65 Tahun	18 845	19 182	72 323	110 350	1,44
Total	32 157	26 664	196 678	255 499	3,33

Tabel 6.8. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Berjalan/Naik Tangga menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Gangguan Berjalan/Naik Tangga							
	Sama sekali Tidak bisa		Banyak kesulitan		Sedikit		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	252	469	213	258	3338	3227	3803	3954
Tanggamus	2330	2884	1274	1347	6212	10038	9816	14269
Lampung Selatan	1772	1826	1260	1236	16292	16466	19324	19528
Lampung Timur	1552	2078	854	1690	12264	12993	14670	16761
Lampung Tengah	2900	2928	2007	4328	13385	20012	18292	27268
Lampung Utara	1284	1096	530	1404	8085	10715	9899	13215
Way Kanan	831	692	504	1100	4844	5549	6179	7341
Tulang Bawang	416	642	657	734	2618	2937	3691	4313
Pesawaran	679	970	408	734	3088	4590	4175	6294
Pringsewu	520	923	422	906	2643	3535	3585	5364
Mesuji	380	322	336	575	1424	1518	2140	2415
Tulang Bawang Barat	350	466	549	503	1761	1993	2660	2962
Pesisir Barat	276	272	286	267	1822	2540	2384	3079
Bandar Lampung	1201	1196	819	873	8304	12612	10324	14681
Metro	317	333	193	397	893	980	1403	1710
Lampung	15060	17097	10312	16352	86973	109705	112345	143154

Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga yang sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain relatif banyak jumlahnya di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 112.345 jiwa laki-laki dan 143.154 jiwa perempuan. Ini artinya cukup banyak penderita gangguan yang sama sekali tidak bisa berjalan atau hanya berbaring di tempat tidur saja. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan berjalan atau naik tangga dengan persentase tertinggi jika dibandingkan

dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 4,42 persen dari total penduduknya. Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga berjenis kelamin perempuan masih mendominasi di kabupaten/kota.

6.2.7. Gangguan Bicara/Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi yang berupa percakapan yang dapat dipahami oleh orang lain dan memahami percakapan orang lain. Gangguan komunikasi adalah situasi dimana seseorang mengalami gangguan atau kesulitan dalam memahami perkataan orang lain dan juga sebaliknya perkataannya sulit dipahami. Termasuk gangguan yang diakibatkan karena gangguan bicara, mendengar, gangguan jiwa/mental antara lain: tuna wicara, sengau/gagap/pelo, tuna rungu, gangguan jiwa/mental, gangguan koordinasi sensorik dan motorik, gangguan intelektual (idiot, *down syndrome*), gangguan emosi/perilaku (autis).

Seseorang dikatakan sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/berkomunikasi jika responden tidak dapat memahami perkataan orang lain atau perkataannya sulit dipahami orang lain atau bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Seseorang dikatakan banyak mengalami kesulitan jika responden tidak dapat mendengar dengan jelas dan sulit memahami suara lawan bicara meskipun sudah dikatakan dengan suara yang keras misalnya penderita tuna rungu atau jika responden mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan sangat sulit dipahami oleh lawan bicara walaupun dengan upaya yang keras. Termasuk orang yang mengeluarkan suara bermakna tapi tidak ada lawan bicara yang mengerti. Sedangkan seseorang dikatakan sedikit mengalami kesulitan jika responden tidak dapat langsung menangkap makna dari perkataan lawan bicara, perlu sedikit upaya untuk memahami lawan bicara atau jika responden dapat mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan masih mudah dipahami, seperti misalnya gagap ringan, bibir sumbing, stroke ringan dan lain-lain.

Tabel 6.9. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Bicara/Komunikasi menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2015

Kelompok Usia	Tidak Sama Sekali	Banyak kesulitan	Sedikit kesulitan	Total	Persentase terhadap Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 - 4 Tahun	857	67	2 372	3 296	0,04
5 - 14 Tahun	1 793	1 046	1 137	3 976	0,05
15 - 24 Tahun	1 578	1 914	1 180	4 672	0,06
25 - 44 Tahun	2 738	3 611	3 502	9 851	0,13
45 - 64 Tahun	1 480	2 700	14 336	18 516	0,24
> 65 Tahun	1 850	10 399	44 133	56 382	0,73
Total	10 296	19 737	66 660	96 693	1,26

Sebanyak 138.802 jiwa penduduk usia 2 tahun ke atas merupakan penyandang gangguan bicara komunikasi. Paling banyak dialami penduduk diatas usia 64 tahun sebesar 0,73 persen. Diikuti kelompok usia 45-64 tahun sebesar 0,24 persen. Berdasarkan tingkat keparahannya, sebanyak 10.296 jiwa sama sekali tidak dapat bicara atau komunikasi, 19.737 jiwa mengalami gangguan bicara atau komunikasi yang cukup parah dan 66.660 jiwa mengalami sedikit gangguan.

Tabel 6.10. Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Bicara/Komunikasi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Gangguan berkomunikasi							
	Sama sekali Tidak bisa		Banyak kesulitan		Sedikit		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Lampung Barat	304	259	253	147	1070	1608	1627	2014
Tanggamus	385	936	890	880	2390	4171	3665	5987
Lampung Selatan	504	708	984	1354	3372	5156	4860	7218
Lampung Timur	455	718	1852	1547	5484	6184	7791	8449
Lampung Tengah	1041	337	1310	2958	5040	6596	7391	9891
Lampung Utara	469	135	815	356	2971	4400	4255	4891
Way Kanan	32	169	312	477	1095	1395	1439	2041
Tulang Bawang	424	190	469	658	1363	1086	2256	1934
Pesawaran	292	344	154	156	605	1271	1051	1771
Pringsewu	225	94	498	616	1042	1710	1765	2420
Mesuji	0	173	371	305	625	751	996	1229
Tulang Bawang Barat	105	67	244	357	183	1126	532	1550
Pesisir Barat	72	0	61	159	298	378	431	537
Bandar Lampung	890	768	605	582	1938	2595	3433	3945
Metro	87	113	226	141	310	447	623	701
Lampung	5285	5011	9044	10693	27786	38874	42115	54578

Tabel 6.10 menunjukkan bahwa penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan bicara/komunikasi lebih banyak dialami oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan (54.578 jiwa) dibanding laki-laki (42.115 jiwa). Kabupaten/Kota yang relatif banyak mempunyai penyandang gangguan bicara/komunikasi adalah Kabupaten Lampung Tengah (17.282 jiwa), diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur (16.240 jiwa), dan kabupaten Lampung Selatan sebanyak 12.078 jiwa.

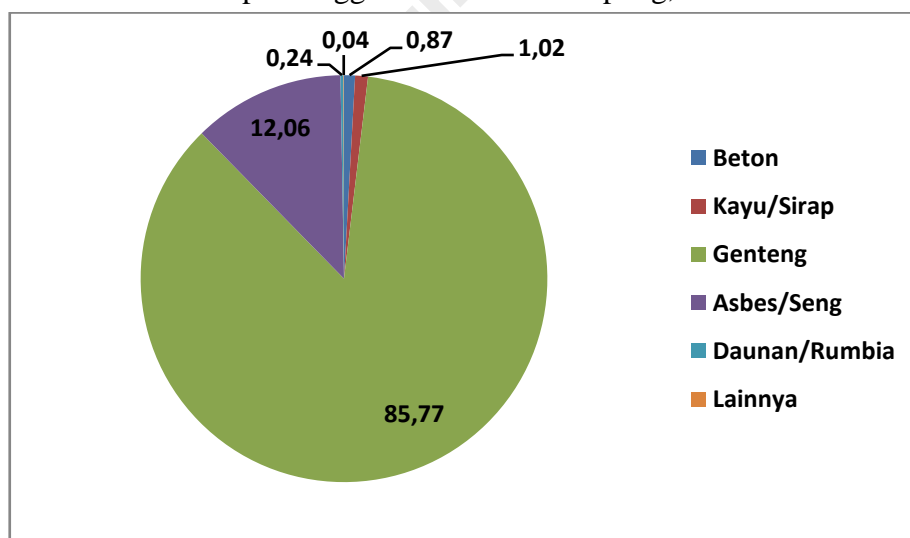
<http://lampung.bps.go.id>

Bab VII. Perumahan

7.1. Keadaan Perumahan

Indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa sekitar 2.134.287 rumah tangga (99,72 persen) di Provinsi Lampung tinggal di rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis atap yang tergolong tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu atap berupa daun-daunan/rumbia dan lainnya sebesar 5.950 rumah tangga (0,28 persen). Di Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang masih banyak rumah tanggayang menggunakan atap rumbia dibanding daerah lainnya. Faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama masih banyaknya penggunaan rumbia sebagai atap rumah.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2015



Penggunaan dinding dapat dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin. Jenis dinding yang memenuhi syarat rumah layak huni adalah tembok dan kayu. Rumah tangga yang menggunakan dinding tembok di Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 1.542.379 rumah tangga (86,03 persen). Sedangkan rumah tangga yang

Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

menggunakan dinding kayu sebesar 397.523 rumah tangga (18,57 persen). Penggunaan dinding selain tembok dan kayu oleh rumah tangga di Provinsi Lampung yaitu berupa bambu masih mencapai 177.926 rumah tangga (8.31 persen) dan dinding lainnya sebesar 22.409 rumah tangga (1,05 persen).

Tabel 7.1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	20 024	51 659	7 921	104	79 708
Tanggamus	83 762	49 494	13 856	745	147857
Lampung Selatan	199 815	18 462	41 830	408	260 515
Lampung Timur	233 537	23 864	19 051	308	276 760
Lampung Tengah	273 795	38 307	24 746	459	337 307
Lampung Utara	99 579	38 212	17 429	-	155 220
Way Kanan	60 812	47 689	5 871	154	114 526
Tulang Bawang	60 463	34 090	6 426	16 390	117 369
Pesawaran	80 872	16 571	12 068	211	109 722
Pringsewu	84 571	6 633	10 127	582	101 913
Mesuji	27 963	24 632	1 400	960	54 955
Tulang Bawang Barat	53 225	16 737	3 700	156	73 818
Pesisir Barat	18 970	16 598	479	54	36 101
Bandar Lampung	206 994	13 759	11 714	1 869	234 336
Metro	37 997	816	1 308	9	40 130
Total	1 542 379	397 523	177 926	22 409	2 140 237

Pada tabel 7.1 terlihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan masih banyak rumah tangga yang menggunakan bambu sebagai dinding rumah yaitu 16,06 persen atau 41.830 rumah tangga dari 260.515 rumah tangga. Terbesar kedua adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 24.746 rumah tangga. Dinding bambu merupakan salah satu kriteria yang masuk dalam dinding tidak layak. Penggunaan atap dan dinding yang tidak layak di 2 kabupaten tersebut memicu terdapatnya rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal kedua kabupaten memiliki persentase status tempat tinggal milik sendiri terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah memiliki rumah sendiri namun tidak layak huni. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk program bedah rumah yang tidak layak huni.

Tabel 7.2 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Tanah	Bukan Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	13 083	66 625	79 708
Tanggamus	27 503	120 178	147 857
Lampung Selatan	23 917	236 598	260 515
Lampung Timur	15 212	261 548	276 760
Lampung Tengah	17 048	320 259	337 307
Lampung Utara	12 885	142 335	155 220
Way Kanan	13 119	101 407	114 526
Tulang Bawang	14 498	102 871	117 369
Pesawaran	14 629	95 093	109 722
Pringsewu	9133	92 780	101 913
Mesuji	9 667	45 288	54 955
Tulang Bawang Barat	4 311	69 507	73 818
Pesisir Barat	4 955	31 146	36 101
Bandar Lampung	2 570	231 766	234 336
Metro	361	39 769	40 130
Total	182 891	1 957 170	2 140 237

Selain atap dan dinding rumah, lantai juga menjadi indikator rumah layak huni. Rumah tangga di Provinsi Lampung yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai tanah pada tahun 2015 sebanyak 182.891 rumah tangga. Artinya masih ada 8,55 persen rumah yang berlantai tanah. Apabila dibandingkan menurut kabupaten/kota, Kabupaten Tanggamus merupakan persentase terbesar yang rumah tangganya masih menggunakan lantai tanah yaitu sebanyak 27.503 rumah tangga (18,6 persen). Kemudian disusul oleh Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah rumah yang berlantai tanah sebanyak 23.917 rumah tangga (9,18 persen). Kemiskinan dan budaya masih menjadi faktor penyebab masyarakat masih menggunakan lantai tanah. Masyarakat masih mempertahankan rumah adat dan rumah warisan orang tua yang masih berlantai tanah.

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk memastikan kondisi rumah layak huni adalah luas lantai per kapita. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan dari hasil kajian pemerintah, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,8 m. Sedangkan menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

minimal adalah 10 m² (BPS, 2012). Berdasarkan data SUPAS 2015 rumah tangga dengan luas lantai per kapita minimal 10 m² sebanyak 1.855.837 rumah tangga (86,71 persen). Artinya masih ada 13,29 persen rumah tangga atau sekitar 284.400 rumah tangga yang menempati rumah dengan luas per kapita yang belum sesuai standar ideal.

Tabel 7.3. Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai per Kapita Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	<10	>=10	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	21 164	58 544	79 708
Tanggamus	21 222	126 635	147 857
Lampung Selatan	25 192	235 323	260 515
Lampung Timur	9 328	267 432	276 760
Lampung Tengah	23 526	313 781	337 307
Lampung Utara	31 575	123 645	155 220
Way Kanan	22 985	91 541	114 526
Tulang Bawang	20 323	97 046	117 369
Pesawaran	16 877	92 845	109 722
Pringsewu	8 871	93 042	101 913
Mesuji	5 951	49 004	54 955
Tulang Bawang Barat	5 381	68 437	73 818
Pesisir Barat	9 314	26 787	36 101
Bandar Lampung	59 054	175 282	234 336
Metro	3 637	36 493	40 130
Total	284 400	1 855 837	2 140 237

9.1.2. Fasilitas Rumah

Pemenuhan fasilitas perumahan diantaranya berupa fasilitas penerangan, air minum, tempat pembuangan akhir kotoran/tinja dan bahan bakar yang digunakan. Rumah yang sehat dan nyaman tentunya memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Fasilitas penerangan berupa listrik harus sudah tersedia. Selain itu keberadaan air bersih baik untuk minum, memasak, mandi dan kebutuhan lainnya juga harus terpenuhi. Keberadaan jamban/wc serta pembuangan akhir tinja harus memenuhi kriteria rumah sehat.

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan rumah tangga di Provinsi Lampung yang telah menggunakan listrik mencapai 2.097.146 rumah tangga (97,99 persen). Penggunaan listrik yang dimaksud disini adalah termasuk mereka yang menggunakan listrik PLN baik dengan meteran dan tanpa meteran serta listrik dari

non-PLN. Sebesar 43.091 rumah tangga (2,01 persen) masih menggunakan sumber penerangan bukan listrik seperti petromak/lampu tekan, aladin, lampu teplok, sentir, pelita, lampu karbit, lilin, biji jarak dan lainnya.

Tabel 7.4. Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015

Tipe Daerah	Listrik PLN Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	502 734	64 049	4 878	2 522
Perdesaan	1 186 773	234 036	104 676	40 569
Perkotaan+Perdesaan	1 689 507	298 085	109 554	43 091

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air minum yang bersih dan mencukupi merupakan syarat untuk dapat hidup sehat. Sumur terlindung sebagai sumber air minum utama terbanyak yang dipakai oleh rumah tangga di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 981.190 rumah tangga atau 45,84 persen. Sumber air minum terbanyak kedua yang digunakan rumah tangga adalah sumur tak terlindung yaitu sebanyak 428.230 rumah tangga (20,01 persen).

Tabel 7.5 Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum menurut Tipe Daerah di Provinsi Lampung, 2015

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan	67 484	24 014	91 498
Air Isi Ulang	171 962	134 883	306 845
Leding Sampai Rumah	24 543	49 330	73 873
Leding Eceran	8 381	5 097	13 478
Pompa	27 074	21 960	49 034
Sumur Terlindung	198 068	783 122	981 190
Sumur Tak Terlindung	54 523	373 707	428 230
Mata Air Terlindung	15 590	77 110	92 700
Mata Air Tak Terlindung	4 959	63 295	68 254
Air Sungai	95	21 812	21 907
Air Hujan	299	8 795	9 094
Lainnya	1 205	2 929	4 134

Jika kita bandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan dalam penggunaan sumber air minum. Di daerah perkotaan sumber air minum terbesar

adalah air sumur terlindung (34,5 persen) dan air isi ulang (29,95 persen) sedangkan di perdesaan sumber air minum terbesar adalah sumur terlindung (50,01 persen) dan sumur tak terlindung (23,86 persen). Penggunaan air isi ulang ini dirasa lebih praktis oleh masyarakat perkotaan, karena tidak perlu repot merebus air dan banyak menghabiskan bahan bakar. Selain itu banyak tempat pengisian air minum isi ulang dengan biaya terjangkau. Sedangkan masyarakat perdesaan lebih memilih merebus sendiri air minum dari sumur terlindung.

Salah satu fasilitas penting lainnya dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Berdasarkan hasil SUPAS 2015, sebanyak 1.824.682 rumah tangga (85,26 persen) telah menggunakan jamban sendiri. Sedangkan yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum sebanyak 155.645 rumah tangga (7,27 persen). Selain itu terdapat 159.910 rumah tangga (7,47 persen) yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Tabel 7.6. Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

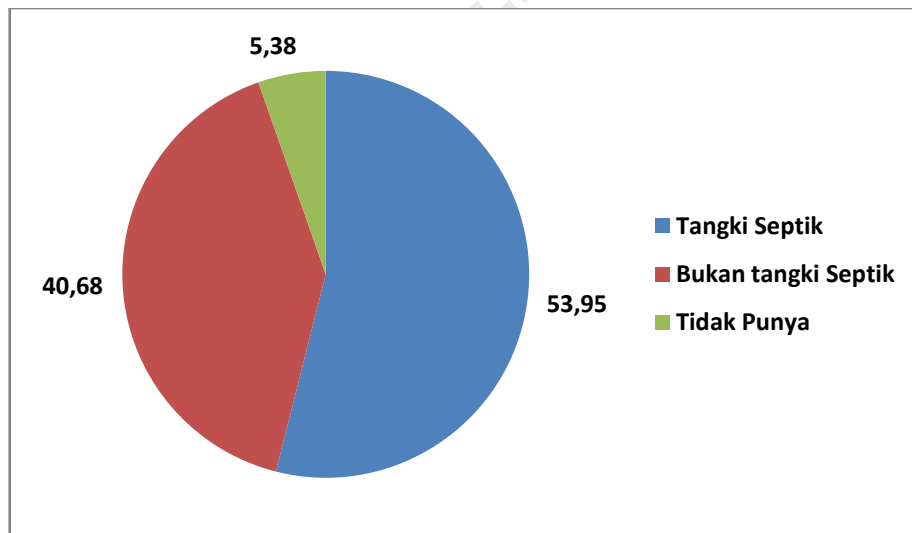
Kabupaten/Kota	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	59 971	2 450	759	16 528
Tanggamus	100 141	8 209	1 630	37 877
Lampung Selatan	215 526	22 100	1 049	21 840
Lampung Timur	255 438	17 753	369	3 200
Lampung Tengah	296 483	32 396	169	8 259
Lampung Utara	135 780	8 409	905	10 126
Way Kanan	97 289	7 278	577	9 382
Tulang Bawang	109 367	5 881	142	1 979
Pesawaran	82 668	4 368	1 193	21 493
Pringsewu	80 161	10 544	474	10 734
Mesuji	49 468	4 299	119	1 069
Tulang Bawang Barat	68 971	4 348	61	438
Pesisir Barat	24 061	718	84	11 238
Bandar Lampung	212 326	12 502	3 791	5 717
Metro	37 032	2 910	158	30
Total	1 824 682	144 165	11 480	159 910

Jika kita lihat dari persentase, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi tidak ada fasilitas buang air besar yaitu sebesar 31,13 persen, Kabupaten Tanggamus menyusul di urutan kedua dengan persentase yang

tidak memiliki fasilitas buang air besar sebesar 25,62 persen dan urutan ketiga adalah Kabupaten Lampung Barat dengan persentase sebesar 20,74 persen. Menanggapi situasi ini pemerintah Provinsi Lampung harus serius dalam mengusahakan jamban yang layak bagi rumah tangga di ketiga kabupaten tersebut. Mengingat banyak rumah tangga di ketiga kabupaten tersebut yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Keberadaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Namun, akses terhadap sanitasi layak bukan hanya ditentukan oleh tingkat kesejahteraan rumah tangga, namun sering pula dipengaruhi oleh faktor budaya/kebiasaan. Masyarakat perdesaan lebih memilih sungai atau kebun sebagai tempat buang air besarnya karena faktor kebiasaan dan budaya. Padahal hal ini sangat tidak mendukung kampanye hidup bersih yang digalakkan oleh pemerintah.

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Lampung, 2015



Tempat penampungan kotoran/tinja berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Tempat penampungan berupa lobang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang kurang sedap di sekitarnya. Tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah

tangki septik. Menurut hasil SUPAS 2015, rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja sebanyak 1.068.331 rumah tangga (53,95 persen). Sedangkan yang menggunakan bukan tangki septik sebesar 805.515 rumah tangga (40,68 persen) dan sebanyak 106.481 rumah tangga (5,38 persen) tidak mempunyai penampungan akhir tinja.

Fasilitas lainnya berkaitan dengan pemanfaatan energi rumah tangga adalah penggunaan bahan bakar memasak. Sumber energi yang digunakan untuk memasak diantaranya listrik, gas, minyak tanah, briket/arang/batubara, kayu bakar dan lainnya. Penggunaan bahan bakar/energi utama memasak di Provinsi Lampung terbesar adalah gas yaitu sebanyak 1.171.383 rumah tangga (54,73 persen). Kayu bakar menempati urutan terbesar kedua dengan penggunaan sebanyak 904.322 rumah tangga (42,25 persen).

Tabel 7.7. Penggunaan Bahan Bakar/ Energi Utama Memasak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Arang/ Briket/ Batu-bara	Kayu Bakar	Tidak Pakai	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	307	29 682	86	109	49 428	96	-
Tanggamus	5 221	59 332	1 088	125	81 608	375	108
Lampung Selatan	5 452	142 002	1 088	104	110 948	854	67
Lampung Timur	3 092	133 391	636	-	138 670	763	208
Lampung Tengah	5 323	183 752	2 570	235	142 663	2 734	30
Lampung Utara	4 062	67 541	918	116	81 881	556	148
Way Kanan	684	42 117	737	93	70 654	232	9
Tulang Bawang	2 121	68 587	420	182	44 742	1 317	-
Pesawaran	1 297	53 858	424	100	53 475	568	-
Pringsewu	973	61 939	487	-	38 400	114	-
Mesuji	9	26 291	380	740	27 411	124	-
Tulang Bawang Barat	693	39 603	-	81	33 441	-	-
Pesisir Barat	489	13 604	64	30	21 748	166	-
Bandar Lampung	5 948	213 343	4 012	1 279	6 519	3 235	-
Metro	395	36 341	137	50	2 734	300	173
Total	36 066	1 171 383	13 045	3 244	904 322	11 434	743

Kayu bakar merupakan jenis bahan bakar memasak yang paling murah, dan relatif mudah didapatkan karena banyak tersedia di alam. Namun, penggunaan bahan bakar kayu memberikan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, polusi udara dan efek rumah kaca. Selain itu, penggunaan kayu bakar dalam jangka panjang dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya hutan.

Jika kita lihat berdasarkan kabupaten/kota, daerah yang terbanyak menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama dalam rumah tangga terdapat di Kabupaten Lampung Barat. Dari 79.708 rumah tangga yang ada, 62,01 persen rumah tangganya menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Selanjutnya Kabupaten Way Kanan dari 114.526 rumah tangga yang ada sebanyak 61,69 persen menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak, disusul Kabupaten Pesisir Barat dari 36.101 rumah tangga 60,24 persen menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Hal ini diduga karena kayu bakar lebih mudah didapatkan sehingga banyak rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak. Beberapa rumah tangga mempunyai gas elpiji namun tidak digunakan sebagai bahan bakar utama dalam memasak karena dirasa gas elpiji lebih mahal. Selain itu ada juga yang masih takut menggunakan gas elpiji dikarenakan takut meledak dan tidak tahu cara penggunaannya.

7.2. Pemenuhan Kebutuhan Untuk Perumahan

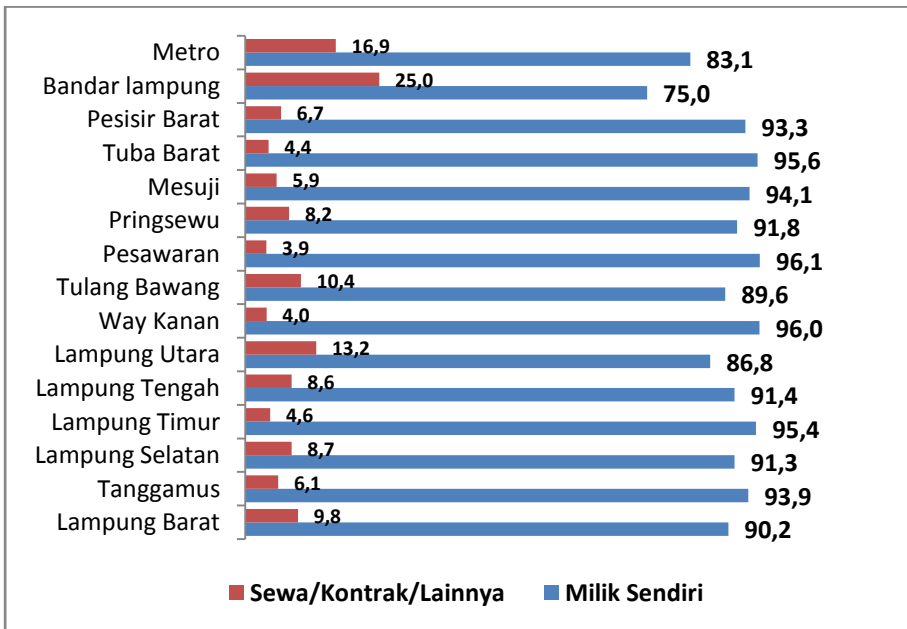
Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal berupa rumah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan untuk mempunyai rumah.

Pemerintah melalui program sejuta rumah sejak April 2015 memberikan bantuan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), non-MBR dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan penghasilan maksimal 4 juta per bulan. Dengan adanya Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

program sejuta rumah diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memiliki rumah layak dan mengurangi permukiman kumuh.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang permanen dalam jangka panjang.

Gambar 7.3. Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2015



Berdasarkan hasil SUPAS 2015, persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri di Provinsi Lampung sebesar 90,39 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.934.524. Rumah tangga yang status kepemilikan rumahnya sewa, kontrak dan lainnya sebesar 9,61persen (205.713 rumah tangga). Apabila dibandingkan menurut wilayah terdapat perbedaan yang signifikan, 93,62 persen rumah tangga di perdesaan menempati rumah dengan status kepemilikan rumah milik sendiri sedangkan yang di perkotaan hanya 81,59 persen. Kondisi ini diduga dari banyaknya pendatang yang masuk wilayah perkotaan, namun mereka belum mampu memiliki rumah sendiri sehingga masih menyewa/mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Di samping itu, harga rumah di perkotaan relatif tinggi.

Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri terkecil 175.738 rumah tangga (74,99 persen). Sisanya sebanyak 58.598 rumah tangga (25,01 persen) memiliki status kepemilikan tempat tinggal sewa, kontrak dan lainnya.

<http://lampung.bps.go.id>

Bab VIII. Perubahan Iklim

8.1. Pengetahuan Tentang Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang ekstrim merupakan fenomena alam yang terjadi di bumi dewasa ini, dalam jangka waktu yang relatif lama dalam lingkup regional ataupun global. *Global warming* merupakan salah satu aspek yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim global (*global climate change*) pada dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) yaitu peningkatan suhu udara karena meningkatnya emisi gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O) di atmosfer. Ini disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.

Efek rumah kaca sudah terjadi sejak Revolusi Industri pada abad 19, dimana banyak lahan hijau yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman penduduk. Radiasi sinar matahari dengan leluasa dipancarkan ke bumi dan terperangkap dalam rumah-rumah kaca yang berakibat pada pemanasan global dan perubahan iklim. Fenomena ini memiliki dampak penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi.

Perubahan iklim global akan memberikan dampak yang sangat parah bagi Indonesia karena posisi geografis yang terletak di garis ekuator, antara dua benua dan dua samudera. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 81.000 km garis pantai dimana dua pertiga wilayah berupa lautan, dan dengan populasi penduduk nomor empat terbesar di dunia.

Kegagalan Indonesia yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia dalam menyelamatkan diri dari perubahan iklim memberikan andil yang cukup besar terhadap permasalahan perubahan iklim global. Menghadapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara nasional hingga 26 persen pada tahun 2020 dengan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41 persen jika ada

dukungan internasional dalam aksi mitigasi. Kegiatan ini dituangkan dalam Program Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kurniatun, 2007).

Mengingat pentingnya masalah perubahan iklim, pada SUPAS 2015 dikumpulkan pula informasi tentang perubahan iklim. Unsur-unsur perubahan iklim yang dapat dikenali adalah munculnya fenomena adanya peningkatan suhu global, ketidakpastian musim, kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan banjir terus menerus dan kenaikan permukaan air laut yang akhirnya membuat puluhan bahkan ratusan pulau kecil di Indonesia tenggelam (BPS, 2015).

Tabel 8.1. Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim			
	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	21 367	26,81	5 8341	73,19
Tanggamus	25 128	16,99	122 729	83,01
Lampung Selatan	84 049	32,26	176 466	67,74
Lampung Timur	82 728	29,89	194 032	70,11
Lampung Tengah	148 361	43,98	188 946	56,02
Lampung Utara	38 461	24,78	116 759	75,22
Way Kanan	51 256	44,75	63 270	55,25
Tulang Bawang	34 386	29,30	82 983	70,70
Pesawaran	27 853	25,39	81 869	74,61
Pringsewu	38 050	37,34	63 863	62,66
Mesuji	14 081	25,62	40 874	74,38
Tulang Bawang Barat	24 692	33,45	49 126	66,55
Pesisir Barat	9 465	26,22	26 636	73,78
Bandar Lampung	87 620	37,39	146 716	62,61
Metro	25 096	62,54	15 034	37,46
Total	712 593	33,30	1 427 644	66,70

Informasi mengenai perubahan iklim diperoleh dari kepala rumah tangga atau pasangannya atau anggota rumah tangga lainnya yang sudah dewasa. Dari total 2.140.237 rumah tangga, hanya sebesar 33,3 persen atau sebanyak 712.593 rumah tangga yang pernah mendengar tentang perubahan iklim. Keberadaan rumah tangga belum pernah mendengar tentang perubahan iklim sebesar 66,7 persen (1.427.644 rumah tangga) merupakan angka yang cukup mengkhawatirkan, karena akan sulit untuk mengatasi penyebab perubahan iklim apabila masyarakat belum pernah

mendengar perubahan iklim itu sendiri. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang perubahan iklim baik penyebab maupun dampaknya.

Tabel 8.2. Jumlah Rumah Tangga yang Pernah tahu tentang Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Tahu tentang Perubahan Iklim			
	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	9 226	43,18	12 141	15,23
Tanggamus	11 798	46,95	13 330	9,02
Lampung Selatan	42 376	50,42	41 673	16,00
Lampung Timur	48 915	59,13	33 813	12,22
Lampung Tengah	91 017	61,35	57 344	17,00
Lampung Utara	25 434	66,13	13 027	8,39
Way Kanan	39 031	76,15	12 225	10,67
Tulang Bawang	16 126	46,90	18 260	15,56
Pesawaran	13 941	50,05	13 912	12,68
Pringsewu	25 320	66,54	12 730	12,49
Mesuji	10 583	75,16	3 498	6,37
Tulang Bawang Barat	12 044	48,78	12 648	17,13
Pesisir Barat	4 109	43,51	5 356	14,84
Bandar Lampung	63 489	72,46	24 131	10,30
Metro	20 353	81,10	4 743	11,82
Total	433 762	60,87	278 831	13,03

Dari total rumah tangga yang pernah mendengar tentang perubahan iklim yaitu sebanyak 712.593 rumah tangga, sebanyak 433.762 rumah tangga atau 60,87 persen rumah tangga mengetahui perubahan iklim. Mereka tersebar di wilayah perkotaan sebanyak 160.828 rumah tangga dan sebanyak 272.934 rumah tangga bertempat tinggal di perdesaan.

Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup terutama manusia. Dari 433.762 rumah tangga yang tahu tentang perubahan iklim, 387.702 rumah tangga diantaranya menyatakan bahwa suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih merupakan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Sedangkan 19.319 rumah tangga menyatakan bahwa suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih bukan dampak dari perubahan iklim dan sisanya yaitu sebanyak 6,16 persen (26.741 rumah tangga) menyatakan tidak tahu.

Tabel 8.3. Jumlah Rumah Tangga yang Mengetahui Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Suhu Semakin Panas, Musim Hujan tidak Menentu dan Kelangkaan Air Bersih merupakan Akibat Perubahan Iklim					
	Ya		Tidak		Tidak Tahu	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	4 808	52,11	1 101	11,93	3 317	35,95
Tanggamus	8 835	74,89	1 062	9,00	1 901	16,11
Lampung Selatan	34 866	82,28	4 738	11,18	2 772	6,54
Lampung Timur	46 279	94,61	1 093	2,23	1 543	3,15
Lampung Tengah	80 312	88,24	3 394	3,73	7 311	8,03
Lampung Utara	24 753	97,32	278	1,09	403	1,58
Way Kanan	37 071	94,98	1 329	3,40	631	1,62
Tulang Bawang	15 280	94,75	281	1,74	565	3,50
Pesawaran	10 838	77,74	1 908	13,69	1 195	8,57
Pringsewu	23 340	92,18	1 470	5,81	510	2,01
Mesuji	10 190	96,29	241	2,28	152	1,44
Tulang Bawang Barat	10 761	89,35	446	3,70	837	6,95
Pesisir Barat	3 280	79,82	71	1,73	758	18,45
Bandar Lampung	57 672	90,84	1 278	2,01	4 539	7,15
Metro	19 417	95,40	629	3,09	307	1,51
Total	387 702	89,38	19 319	4,45	26 741	6,16

8.2. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Tiga dampak utama dari perubahan iklim seperti telah dibahas sebelumnya adalah suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih. Ketika dampak tersebut sudah mulai dirasakan oleh penduduk, maka upaya pencegahan dari hal-hal kecil dalam rumah tangga harus mulai dilakukan. Suhu udara bumi yang semakin panas sebagai akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sifat dari GRK adalah menahan/menyerap radiasi gelombang panas dari sinar matahari yang dipantulkan bumi keluar dari atmosfer, sehingga panas matahari tersebut terperangkap di bumi yang mengakibatkan suhu udara bumi menjadi panas. Suhu udara yang lebih panas tidak hanya dirasakan pada siang hari, namun juga pada malam hari.

Dari tabel 10.4 terlihat dari 2.140.237 rumah tangga, sebesar 69,23 persen (1.481.594 rumah tangga) merasakan suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun

terakhir. Sebanyak 888.626 rumah tangga (59,98 persen) diantaranya melakukan upaya untuk mengurangi suhu yang semakin panas dengan cara memasang/menggunakan AC atau kipas angin, menanam pohon di pekarangan rumah yang membuat rumah lebih sejuk, tidak membakar sampah, dan sebagainya. Sementara sisanya 592.968 rumah tangga (40,02 persen) tidak melakukan upaya apapun untuk mengurangi suhu panas.

Suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir paling banyak dirasakan oleh rumah tangga yang tinggal di Kota Bandar Lampung yaitu dari 213.558 rumah tangga yang ada, 91,13 persen diantaranya merasakan suhu udara yang lebih panas. Hal ini bisa dipahami karena Kota Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi dimana selama 5 tahun terakhir ini perkembangannya begitu pesat, sehingga lahan untuk tumbuhan sudah semakin sedikit. Selain itu banyaknya gedung- gedung tinggi, pemakaian listrik yang besar, jumlah kendaraan yang selalu bertambah, serta banyaknya pabrik baru bermunculan merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya suhu secara umum. Beberapa dampaknya bisa dilihat dari tingginya penggunaan bahan bakar kendaraan, asap pabrik, pemakaian listrik yang banyak, ini dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. Selanjutnya suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir juga dirasakan oleh rumah tangga yang berada di Kabuapten Tulang Bawang (86,36 persen) dan Kota Metro (83,41 persen). Sebaliknya dari 79.708 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung Barat hanya 37,57 persen diantaranya yang 5 tahun terakhir merasakan suhu udara yang lebih panas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat selain daerahnya yang berhawa dingin karena berada di wilayah dataran tinggi, kabupaten ini masih memiliki banyak hutan belantara, yang merupakan bagian dari hutan lindung Tanam Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan demikian secara umum untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar penduduk nya tidak merasakan suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya dua daerah yang rumah tangganya sedikit merasakan suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir adalah di Kabupaten Pesawaran (44,56 persen) dan Kabupaten Pesisir Barat (44,92 persen).

Tabel 8.4 Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara Lebih Panas 5 Tahun Terakhir di Provinsi Lampung,2015

Kabupaten/Kota	Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas 5 tahun Terakhir		Melakukan Upaya Mengurangi Suhu yang Panas			
	Ya		Ya		Tidak	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	29 949	37,57	12 713	42,45	17 236	57,55
Tanggamus	71 410	48,30	23 410	32,78	48 000	67,22
Lampung Selatan	166 488	63,91	88 446	53,12	78 042	46,88
Lampung Timur	180 083	65,07	106 136	58,94	73 947	41,06
Lampung Tengah	265 818	78,81	187 616	70,58	78 202	29,42
Lampung Utara	97 859	63,05	44 135	45,10	53 724	54,90
Way Kanan	91 451	79,85	55 473	60,66	35 978	39,34
Tulang Bawang	101 362	86,36	41 614	41,05	59 748	58,95
Pesawaran	48 896	44,56	18 806	38,46	30 090	61,54
Pringsewu	73 920	72,53	54 021	73,08	19 899	26,92
Mesuji	41 911	76,26	30 318	72,34	11 593	27,66
Tulang Bawang Barat	49 199	66,65	26 628	54,12	22 571	45,88
Pesisir Barat	16 217	44,92	7 425	45,79	8 792	54,21
Bandar Lampung	213 558	91,13	165 484	77,49	48 074	22,51
Metro	33 473	83,41	26 401	78,87	7 072	21,13
Total	1 481 594	69,23	888 626	59,98	592 968	40,02

Pergeseran musim yang tidak menentu juga merupakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Musim hujan yang lebih singkat dengan intensitas hujan yang besar, selain menimbulkan banjir (efek jangka pendek) akan berdampak pada pertanian dan kebutuhan air bersih (efek jangka panjang). Jika musim kemarau lebih lama berlangsung maka bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen akan terjadi. Selain itu pergeseran musim juga akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pada tabel 10.5 terlihat sebanyak 1.545.234 rumah tangga (72,2 persen) di Provinsi Lampung merasakan musim hujan tidak menentu dalam 5 tahun terakhir. Dari rumah tangga yang merasakan musim hujan tidak menentu tersebut, hanya sekitar 32,74 persen atau 505.958 rumah tangga diantaranya melakukan upaya untuk mengurangi akibat dari musim hujan yang tidak menentu. Upaya mengurangi dampak buruk dari musim hujan yang tidak menentu dilakukan rumah tangga dengan cara membersihkan saluran air/got dari sampah, sehingga apabila saluran

air lancar diharapkan tidak terjadi banjir walaupun hujan lebat. Upaya lain bisa dengan memperbesar saluran air yang ada atau meninggikan struktur bangunan rumah, dan sebagainya.

Tabel 8.5. Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 Tahun Terakhir Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 tahun Terakhir		Melakukan Upaya Mengurangi akibat dari Musim Hujan Tidak Menentu			
	Ya		Ya		Tidak	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	55 469	69,59	14 933	26,92	40 536	73,08
Tanggamus	79 183	53,55	10 148	12,82	69 035	87,18
Lampung Selatan	176 073	67,59	43 644	24,79	132 429	75,21
Lampung Timur	171 059	61,81	55 715	32,57	115 344	67,43
Lampung Tengah	272 501	80,79	136 605	50,13	135 896	49,87
Lampung Utara	115 381	74,33	27 537	23,87	87 844	76,13
Way Kanan	86 801	75,79	41 693	48,03	45 108	51,97
Tulang Bawang	102 373	87,22	22 000	21,49	80 373	78,51
Pesawaran	47 574	43,36	7 762	16,32	39 812	83,68
Pringsewu	79 255	77,77	39 389	49,70	39 866	50,30
Mesuji	43 247	78,70	17 267	39,93	25 980	60,07
Tulang Bawang Barat	56 036	75,91	13 041	23,27	42 995	76,73
Pesisir Barat	18 801	52,08	6 124	32,57	12 677	67,43
Bandar Lampung	205 238	87,58	50 688	24,70	154 550	75,30
Metro	36 243	90,31	19 412	53,56	16 831	46,44
Total	1 545 234	72,20	505 958	32,74	1 039 276	67,26

Jika kita lihat di 3 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masyarakat yang paling merasakan musim hujan yang tidak menentu selama 5 tahun terakhir adalah Kota Metro dari 40.130 rumah tangga yang ada 90,31 persen atau sebanyak 36.243 rumah tangga diantaranya merasakan musim hujan yang tidak menentu. Selanjutnya juga terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 87,58 persen dan Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 87,22 persen.

Salah satu efek dari pemanasan global yang telah dibahas diatas adalah adanya iklim berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi. seperti saat musim kemarau, yang tidak hanya berlangsung selama 6 bulan seperti seharusnya, tetapi bisa sampai 9 bulan, oleh karena itu jika pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk penanggulangan maupun penyelesaian masalah tersebut, maka suatu daerah Profil Penduduk Provinsi Lampung Hasil SUPAS 2015

bisa menghadapi masalah berupa kelangkaan air bersih. Ketersediaan air pada saat ini berkurang sebesar 10-30 persen di beberapa kawasan terutama di daerah tropika kering. Kelangkaan air bersih yang dirasakan dapat berupa berkurangnya volume air bersih dari sumber air (sumur, pompa, PAM, sungai, mata air, dan lain-lain) yang ada ataupun kejadian kekeringan pada sumber air, sehingga konsumsi air bersih rumah tangga pada waktu tertentu menjadi terbatas ataupun langka. Dari hasil SUPAS 2015, sebanyak 31,91 persen atau 682.911 rumah tangga yang merasakan kelangkaan air bersih dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dapat diartikan bahwa kelangkaan air bersih masih dapat diatasi dengan baik di Provinsi Lampung.

Tabel 8.6. Jumlah Rumah Tangga yang Melakukan Upaya Mengurangi Kelangkaan Air Bersih di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten/Kota	Menanam/ Memelihara Tanaman Tahunan	Membuat Sumur Resapan	Membuat Lubang Resapan Biopori	Memanfaatkan Air Bekas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	23 098	12 116	5 994	9 230
Tanggamus	44 011	895	1 289	4 879
Lampung Selatan	124 335	13 355	8 984	16 818
Lampung Timur	202 234	1 126	124	10 438
Lampung Tengah	226 324	1 795	319	26 442
Lampung Utara	67 090	1 079	303	5 843
Way Kanan	65 042	26	204	5 302
Tulang Bawang	76 662	2 976	4 529	5 423
Pesawaran	47 245	1 431	4 358	5 555
Pringsewu	55446	714	816	7 544
Mesuji	42 143	626	836	4 851
Tulang Bawang Barat	53 412	382	426	13 860
Pesisir Barat	17 710	412	547	1 237
Bandar Lampung	59 124	16 502	15 089	17 909
Metro	20 635	433	185	4 825
Total	1 124 511	53 868	44 003	140 156

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kelangkaan air bersih diantaranya adalah dengan menanam atau memelihara tanaman tahunan di pekarangan, membuat sumur resapan, membuat lubang resapan biopori dan memanfaatkan air bekas (cuci sayur, buah/beras dan wudhu) untuk keperluan lain. Keberadaan tanaman tahunan di pekarangan rumah yang ditanam langsung di

tanah (bukan di pot/drum) berguna untuk resapan air utamanya air hujan dan menambah cadangan air tanah serta mencegah sumber air tanah dari kekeringan. Pada umumnya tanaman tahunan merupakan tanaman perkebunan, dengan ciri-ciri berkayu keras dan dapat dipanen sepanjang tahun sesuai dengan musimnya dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali, seperti misalnya tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan dan lain-lain.

Pada Tabel 10.6 terlihat bahwa upaya terbesar yang sudah dilakukan oleh masyarakat Lampung dalam rangka mengurangi kelangkaan air bersih adalah menanam atau memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah yaitu sebanyak 1.124.511 rumah tangga (52,54 persen), 195.463 rumah tangga di perkotaan dan 929.048 rumah tangga di perdesaan. Pemanfaatan air bekas pakai untuk keperluan lainnya menempati urutan kedua dan sudah dilakukan oleh 140.156 rumah tangga (6,55 persen). Sebanyak 45.081 rumah tangga di perkotaan melakukan upaya memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain, sedangkan di perdesaan hanya sebanyak 95.075 rumah tangga. Contoh upaya yang dimaksud seperti menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran/buah-buahan untuk menyiram tanaman, menggunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman, menggunakan air bekas membilas pakaian untuk mengepel lantai atau membersihkan lantai kamar mandi dan sebagainya.

Sedangkan upaya mengurangi kelangkaan air bersih dengan membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Rumah tangga yang membuat sumur resapan hanya sebanyak 53.868 rumah tangga (2,52 persen), di perkotaan sebanyak 27.862 rumah tangga dan di perdesaan sebanyak 26.006 rumah tangga. Sumur resapan adalah sumur yang dirancang untuk menyerap air hujan atau buangan air dari kamar mandi agar dapat meresap ke dalam tanah. Sumur ini menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu (minimal 1,5 meter) dan permukaannya tertutup. Untuk mempercepat penyerapan air, bagian dalam sumur biasanya diisi oleh batu pecah, bata merah, ijuk, dan arang, dimana batu disusun berongga. Untuk rumah yang memiliki talang air, air hujan dari talang air biasanya akan dialirkan ke sumur resapan melalui pipa.

Sementara untuk rumah yang tidak memiliki talang air, maka sumur berada di bawah taman/parit.

Lubang resapan biopori adalah lubang dengan diameter 10 sampai 30 cm dan kedalaman 30 sampai 100 cm yang diisi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir disekitarnya, sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah dan tumbuhan di sekitarnya, serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh tumbuhan. Lubang resapan biopori memperbesar daya tampung tanah terhadap air hujan, mengurangi genangan air, yangselanjutnya mengurangi limpahan air hujan turun kesungai. Dari total rumah tangga 2.140.237 rumah tangga, hanya sebesar 2,06 persen (44.003 rumah tangga) yang membuat lubang resapan biopori sebagai upaya mengurangi kelangkaan air bersih. Rumah tangga di perkotaan yang membuat lubang resapan biopori lebih banyak (54.35 persen) dibandingkan rumah tangga di perdesaan (45.65 persen). Masyarakat perkotaan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang lubang resapan biopori dibandingkan dengan masyarakat perdesaan.

Referensi

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Samosir, Omas Bulan. (2010). *Dasar-Dasar Demografi*. Depok: Salemba Empat dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ananta, Aris dkk. (1993). Peran dan Ruang Lingkup Kependudukan. *Warta Demografi No. 6*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (1997). *Profil Penduduk Indonesia: SUPAS 1995*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 1984. Analisa Fertilitas di Indonesia Berdasarkan Data Sensus Penduduk 1980. Buku I. Jakarta: BPS.
- Jones, M. 2016. *Disability and Labor Market Outcomes*. UK: Cardiff Univesity.
- Kementrian Kesehatan RI. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Semester 2, 2014.
- Maliki. 2010. *Pemanfaatan Bonus Demografi sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan*. Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 01/Tahun XVI/2010.
- Marjuki (t.t). *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi ICF*. Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan, Kemensos RI.
- Muhidin, Salahudin dan Toersilaningsih, Rani. (2010). Data Demografi: Sumber dan Ukuran, Ed. Sri Moertiningsih Adioetomo & Omas Bulan Samosir, *Dasar-Dasar Demografi*. Depok: Salemba Empat dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- UNICEF. 2013. *Anak penyandang Disabilitas: Keadaan Anak di Dunia*. UNICEF.
- World Health Organization. 2011. *World Report on Disability*. Geneva: World Health Organization.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Teluk Betung Bandar Lampung, 35215

Telp. : (0721) 482909, Fax. : (0721) 484329

Homepage : <http://lampung.bps.go.id> E-mail : bps1800@bps.go.id

ISBN 602784872-6



9 786027 848726